

Skema Penelitian
Internal

LAPORAN HASIL PENELITIAN
STRATEGI PEMBANGUNAN KONTEKSTUAL TERPADU
DI SEKTOR PERKEBUNAN, PERTANIAN,
PETERNAKAN, PERIKANAN DAN INDUSTRIALISASI
PENGOLAHAN HASIL MENJADI PAKAN TERNAK/IKAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



TIM PENGUSUL :

- 1. Prof. Dr. H. Sufian, SH, M.Si (Ketua)**
NIDN : 1012026703
- 2. Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd**
NIDN : 1014068604
- 3. Syarifah Ermayuna**
NPM: 217121084

Dibiayai Oleh :
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Riau Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor : 723/KONTRAK/LPPM-UIR/5-2019

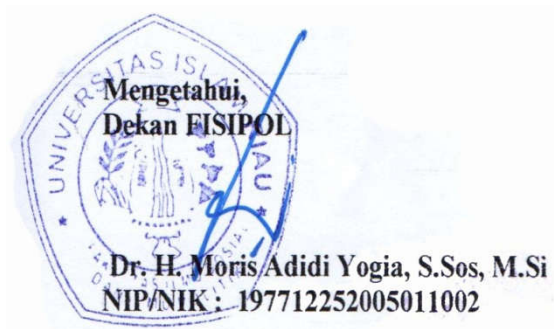
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
DESEMBER 2019

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

- 1. Judul Penelitian:**
Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Industrialisasi Pengolahan Hasil Menjadi Pakan ternak/Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir

 - 2. Kode>Nama Rumpun** : Administrasi Publik
 - 3. Ketua Peneliti**
 - a. Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Sufian, SH, M.Si
 - b. NIDN : 1012026703
 - c. Program Studi : Ilmu Administrasi
 - d. Nomor HP : 0811764589
 - e. Email : sufianhamim@gmail.com
 - 4. Anggota Peneliti (1)**
 - a. Nama Lengkap : Lolita Vianda, S. Sos, M.Pd
 - b. NIDN : 1014068604
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. Nomor HP : 085267380390
 - e. Email : lolitavianda@gmail.com
 - 5. Anggota Peneliti (2)**
 - a. Nama Lengkap : Syarifah Ermayuna
 - b. NPM : 217121084
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - 6. Lokasi Penelitian** : Kabupaten Indragiri Hilir
- Dana yang diusulkan** : Rp. **20.000.000,-** (Duapuluh Juta Rupiah)

Pekanbaru, Novemver 2019



Pengusul,

Prof. Dr. H. Sufian, S.H, M.Si
NIP/NIK : 1012026703

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Riau

Dr.Evizal Abdul Kadir. M.Eng
NIK: 1611020613

Lampiran 6. Surat Keterangan Persetujuan Revisi Penelitian Oleh Reviewer

**SURAT KETERANGAN
PERSETUJUAN REVISI SEMINAR HASIL
PENELITIAN INTERNAL UIR TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Sufian, SH, M.Si

NIDN : 1012026703

Fakultas : Pascasarjana


Judul Riset : Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Industrialisasi Pengolahan Hasil Menjadi Pakan Ternak/Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir

dengan ini menyatakan bahwa sudah melakukan perbaikan usulan penelitian setelah diseminarkan sesuai dengan hasil *reviewer* pelaksanaan seminar usulan proposal Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau pada hari, tanggal 2019 di Ruang Rapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Riau, yang selanjutnya telah diperiksa dan disetujui oleh reviewer.

Demikianlah keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2019

Ketua Peneliti



Prof. Dr. H. Sufian, S.H, M.Si
NIP/NIK : 1012026703

Reviewer 1

Reviewer 2

(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum)
NIDN. 0008085403

(Dr. H. Syafendry, M.Si)
NIDN.1007126601

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN.....	ii
RINGKASAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Luaran Penelitian	9
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1. Tinjauan Penelitian yang Relevan	10
2.2. Kerangka Pikir.....	43
2.3. Konsep Operasional Variabel.....	44
2.4. Operasional Variabel.....	46
2.5. Teknik Pengukuran.....	48
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
3.2. Prosedur Pengumpulan Data.....	50
3.3. Teknik Pengambilan Sampel	51
3.4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	55
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	58
4.2. Industrialisasi Pengolahan Pakan Ternak dan Pakan Ikan	59

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan..... 58

5.2. saran 59

DAFTAR KEPUSTAKAAN61

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Abstrak

Sebagai negara agraris dengan berbagai produk unggulan di setiap daerah, terutama pada kegiatan pertanian, industri kecil dan kerajinan rakyat, maka pengembangan ekonomi berbasis pertanian yang berorientasi pada pembangunan agribisnis, perlu terus ditingkatkan karena diyakini dapat memperkokoh perekonomian Bangsa Indonesia. Dengan demikian perlu mengembangkan kawasan-kawasan pembangunan dengan strategi pembangunan kontekstual terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Industrialisasi Pengolahan Menjadi Pakan Ternak/Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode riset yang digunakan melalui penelitian lapangan saling memperkuat pendekatan kuantitatif dan kualitatif yaitu penelitian survei menggali sumber informasi data primer dan sekunder dari kuesioner, wawancara, pengamatan, partisipasi, FGD dan kajian bersama komunitas di wilayah sentra produksi perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan industrialisasi dijadikan lokasi penelitian. Strategi pembangunan kontekstual terpadu sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan adalah sebagai proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan berkaitan dengan pilihan kebijakan program, kegiatan dan proyek pembangunan yang berdasar potensi alam dan sosial budaya usaha tani di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sebagai upaya sinergitas produksi, pengolahan pasca panen sampai memasarkan produk. Kabupaten Indragiri Hilir terdapat potensi 45.040,8 ton per tahun bahan baku untuk produksi pakan ternak unggas, pakan ternak dan pakan ikan. Perlu keterpaduan dan saling mengisi pembangunan semua sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan industrialisasi, hulu dan hilirisasi yang terintegrasi ke dalam suatu pusat pengembangan kawasan pembangunan dengan manajemen pembangunan strategis, terintegrasi dan holistik. Pemantapan manajemen produksi, proses dan pemasaran hasil. Setelah pasca panen petani diharapkan juga mampu melaksanakan usaha pasca panen dengan proses kemasan dan pengolahan produk lanjutan, misalnya pakan ternak dan pakan ikan, sehingga lebih ekonomis dan memiliki nilai tambah. Perlu mengarahkan masyarakat melakukan kegiatan pertanian sesuai kondisi lahan dan kondisi permintaan pasar. Perlu segera merencanakan (*masterplan*) dan mengimpimentasikan *pembangunan* Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sentra pakan ikan dan ternak dengan memanfaatkan potensi 45.040,8 ton per tahun bahan baku untuk produksi pakan ternak unggas, pakan ternak dan pakan ikan. Jika pakan tersebut diperuntukkan budidaya akan menghasilkan produksi, antara lain : Jika 15.000 ton bahan pakan diperuntukkan ternak unggas akan menghasilkan 15.000.000 ekor unggas per tahun dengan berat panen rata rata 1 kg unggas per ekor. Jika 15.000 ton bahan pakan diperuntukkan penggemukan ternak sapi akan menghasilkan pertumbuhan 7.500.000 kg berat sapi setara dengan 30.000 ekor sapi (rerata berat 250 kg/ekor) per tahun. Jika 15.040,8 ton diperuntukkan pemeliharaan ikan akan menghasilkan pertumbuhan 7.502.000 kg berat ikan setara dengan 15.004.000 ekor ikan (rerata berat 0,5 kg/ekor) pertahun.

Kata Kunci : Strategi, Pembangunan, Kontekstual, Terpadu, Industrialisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, dengan mendekatkan pembuatan keputusan ke daerah, sekaligus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pembangunan ekonominya sendiri. Pemberlakuan otonomi daerah juga berarti Pemerintah Daerah harus memiliki rencana ekonomi daerah yang baik untuk menyediakan kesejahteraan bagi penduduknya. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akan membawa angin segar bagi daerah untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri sehingga ketimpangan antar penduduk, antar daerah, antar wilayah dan antar sektor secara bertahap dapat diperkecil.

Arsyad (1999:108) menyatakan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antardaerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai.

Ada beberapa kelemahan masa lalu dan mendasar yang sangat mempengaruhi daerah dalam meraih kemajuan masa depan, antara lain: struktur ekonomi yang terlalu bertumpu pada pengusaha besar dan industri dan beberapa kantong pusat pertumbuhan, sehingga kurang merata, kurang menyebar dan mengakar ke bawah (*trickle-down-effect*); kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah dan kurang mendapat sentuhan yang berarti; Pengelolaan sumber daya alam yang keuntungannya belum dibagi secara proporsional kepada daerah; dan Infrastruktur belum begitu baik yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan aksebelitas peningkatan sumber daya manusia daerah.

Harus diakui struktur birokrasi pemerintahan masih membengkak, lamban dan sebahagiannya kurang professional. Dinas-dinas daerah yang diharapkan sebagai ujung tombak melaksanakan program dan kegiatan pembangunan masih berjalan sendiri-sendiri, masih menunggu perintah dan petunjuk atasan, ego sektoral dan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi nampaknya masih menjadi ganjalan, meskipun upaya perbaikan masalah ini telah dilakukan, namun masih terasa sangat lamban. Permasalah disiplin dan kinerja aparatur juga tidak kalah pentingnya dan dianggap masih rendah.

Dalam hal perencanaan pembangunan, belum memadainya data dan informasi sebagai landasan penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Sehingga pembangunan belum didasarkan karakteristik potensi alam dan potensi masyarakat yang dimiliki daerah, belum jelasnya daerah-daerah mana sebagai basis pengembangan dan keunggulan kompetitif dan pada sektor apa saja. Data dan informasi yang ada di Perdesaan, Kecamatan,

Kabupaten/Kota, dan Provinsi, secara berurut sama kurang lengkap dan tidak akurat. Pengumpulan data dan pembuatan data base dianggap kurang penting. Kapasitas kelembagaan pengolahan data dan informasi kurang diberdayakan. Dengan demikian informasi yang ada tidak memadai untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan di tingkatan Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (MUSBANGDES), Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan; MUSRENBANG Kabupaten/Kota maupun MUSRENBANG Provinsi dan tentunya berdampak pada efektivitas implementasi program pembangunan.

Sebahagian besar program dan proyek yang diusulkan dan disetujui dalam APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan potensi, harapan, keinginan dan tidak menyentuh langsung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Sesungguhnya yang menjadi harapan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah membutuhkan modal dan sarana produksi dalam rangka peningkatan produktivitas usaha. Dalam kenyataannya program dan kegiatan yang direncanakan tidak memakai skala prioritas, justru hanya didominasi pembangunan fisik dan hanya itulah program yang dianggap aman, dan ternyata kurang produktif untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa terutama sektor pertanian masih didominasi cara yang tradisional dan sedikit penerapan ilmu dan teknologi artinya perlu modernisasi dalam pengembangan agroindustri. Masih kecilnya kontribusi investasi swasta dalam pembangunan daerah, dan lebih bertumpu

pada investasi pemerintah. Kesenjangan pendapatan masyarakat masih cukup lebar atau dengan kata lain belum terpadunya pemerataan dengan pertumbuhan ekonomi.

Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan daerah adalah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, sangat diperlukan peranan tokoh pimpinan formal dan informal sebagai figur kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang memahami situasi dan kondisi yang dihadapi, sehingga memahami betul kapan saatnya dan dimana tempat yang tepat untuk melakukan tindakan (*action*).

Wilayah Riau bagian selatan dan barat memiliki karakteristik wilayah yang unik. Kabupaten yang ada di wilayah Riau bagian selatan tersebut tidak memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas dalam jumlah yang cukup besar, kecenderungan masyarakatnya lebih miskin dan aktivitas pembangunan relatif lebih lambat dibanding Kabupaten / Kota yang ada di wilayah Riau bagian utara.

Berkaitan dengan fakta tersebut, ada dua isu utama yang perlu dicermati dalam proses dan aktivitas pembangunan di Riau. Isu pertama adalah tingkat kemiskinan di Riau yang relatif masih tinggi jika dibanding dengan tingkat kemiskinan secara nasional maupun regional. Meskipun dikenal sebagai daerah kaya, faktanya tingkat kemiskinan di Riau masih tinggi. Laporan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2015 menyebutkan bahwa sekitar 18 % penduduk Propinsi Riau masih rentan dengan kondisi kemiskinan (Pemerintah Propinsi Riau, 2014).

Isu kedua adalah persoalan “pemerataan pembangunan antar wilayah” di Provinsi Riau. Beberapa hasil penelitian menunjukkan, ada indikasi terjadi ketimpangan dalam proses kemajuan pembangunan di beberapa wilayah dalam wilayah Provinsi. Riau. Ddalam hal ini wilayah Riau bagian utara dengan sumber daya alam (terutama minyak bumi) yang dimiliki, relatif mengalami proses dan tingkat pembangunan yang lebih cepat bila dibanding dengan wilayah Riau bagian selatan. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, akan tetapi permasalahan yang dominan terutama karena adanya perbedaan potensi kekayaan alam antara kedua wilayah tersebut, dimana Riau bagian utara lebih beruntung karena dikaruniai sumberdaya alam “minyak bumi” yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah Riau bagian selatan, dan secara potensial berdampak terhadap tingkat pendapatan daerah dan aktivitas pembangunan secara keseluruhan.

Adanya perbedaan tingkat pertumbuhan dan pembangunan antar wilayah tentu akan membawa dampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, yang pada akhirnya justru akan menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata justru akan semakin menghambat pertumbuhan wilayah yang relatif tertinggal akan semakin tertinggal.

Untuk mengantisipasi agar ketimpangan tersebut tidak semakin melebar, perlu dilakukan upaya penelitian untuk menggali dan memahami berbagai aspek yang menjadi penyebab kondisi tersebut, sekaligus mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah untuk tumbuh dan berkembang. Hasil

penelitian selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijaksanaan dalam pengalokasian dana pembangunan kepada kabupaten sesuai kondisi dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk dapat dikembangkan.

Berbagai kebijakan yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, sampai saat ini dirasakan masih belum secara signifikan mampu mengatasi masalah kemiskinan, khususnya penduduk miskin perdesaan yang bermata pencaharian sebagai petani. Keterpaduan antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan tersebut juga dirasakan belum sinergi dan belum menyentuh langsung pada akar permasalahan kemiskinan yang sesungguhnya.

Berdasarkan harapan tersebut, pengembangan konsep strategi pembangunan kontekstual terpadu memiliki arti penting dalam perencanaan pembangunan pertanian ke depan perlu disusun secara lebih terarah dan terfokus pada tujuan/sasaran yang diharapkan, khususnya dalam menurunkan angka/jumlah penduduk miskin secara signifikan.

Strategi Pembangunan kontekstual terpadu yang akan dikembangkan merupakan suatu model pembangunan sebuah kawasan yang kontekstual dan adanya keterpaduan dari seluruh proses sektor pertanian, mulai dari Industri Hulu, Proses Produksi, Perdagangan sampai ke Industri Hilir atau dengan kata lain keterpaduan Agrobisnis, Agroindustri. Di dalam kawasan ini akan ditata sedemikian rupa sehingga di dalamnya diciptakan nuansa yang tercermin dari keterpaduan seluruh proses kegiatan tersebut. Jika semua kondisi dapat terwujud,

maka dengan sendirinya sasaran kawasan ini menjadi kawasan Agrowisata. Pada akhirnya diharapkan akan menjadi sebuah kawasan Agropolitan yang akan menjadi cikal bakal sebuah konsep pengembangan kawasan dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, agamis, damai dan sejahtera.

Pembangunan kawasan kontekstual dan terpadu merupakan membangun atas dasar kondisi potensi alam dan sosial yang ada yang dipadukan atau diintegrasikan dengan sarana dan parasana pendukung lainnya sarana produksi, lembaga keuangan dan kelembagaan lainnya, termasuk perlunya membangun kemitraan dengan investor. Dengan menerapkan sistem pertanian yang baik, produksi dan produktivitasnya akan meningkat, maka kegiatan pasca panen (pemasaran ke luar daerah dan peningkatan nilai tambah). Demikian pula kebutuhan sarana produksi lainnya. Seperti traktor dan lainnya) didatangkan dari luar.

Dengan demikian merupakan terminal atau simpul untuk berbagai kegiatan pelayanan untuk dan dari wilayah pengaruhnya, baik yang keluar dari (arus pemasaran dari daerah pertanian di kirim keluar) dan yang masuk (arus input produksi dari luar untuk memenuhi kebutuhan daerah pertanian).

Menurut (Friedmann, 1975) model kawasan yang akan dikembangkan merupakan kawasan pertanian perdesaan merupakan ladang pertanian, yang fungsinya melayani pengembangan daerah pertanian yang menjadi wilayah pengaruhnya dan melayani pemasaran produksi pertanian yang dihasilkan dalam jumlah besar untuk dikirim ke luar daerah.

Sebagai negara agraris dengan berbagai produk unggulan di setiap daerah, terutama pada kegiatan pertanian, industri kecil dan kerajinan rakyat, maka pengembangan ekonomi berbasis pertanian yang berorientasi pada pembangunan agribisnis, perlu terus ditingkatkan karena diyakini dapat memperkuat perekonomian Bangsa Indonesia. Dengan demikian perlu mengembangkan kawasan-kawasan pembangunan dengan strategi pembangunan kontekstual terpadu yang dapat menjadi terminal atau simpul untuk berbagai kegiatan pelayanan untuk dan dari wilayah pengaruhnya, yang memiliki prasarana dan fasilitas yang memadai, seperti: fasilitas perdagangan, gudang hasil pertanian, terminal, pasar, fasilitas perbankan, fasilitas transportasi, dan fasilitas penunjang lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena yang ditangkap maka diangkat judul : “Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Industrialisasi Pengolahan Menjadi Pakan Ternak/Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Industrialisasi Pengolahan Menjadi Pakan Ternak/Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Menganalisis dan Menjelaskan Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Industrialisasi Pengolahan Menjadi Pakan Ternak/Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Maanfaat penelitian adalah :

1. Dapat dijadikan bahan informasi bagi Masyarakat dan Pemerintah
2. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pihak lainnya yang mengangkat permasalahan yang sama.

1.5. Luaran Penelitian

Luaran penelitian merupakan produk ilmiah yang terpenting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, pada narasi luaran penelitian ini akan di jelaskan tentang target yang akan dicapai dalam judul Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Industrialisasi Pengolahan Menjadi Pakan Ternak/Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil data yang disajikan dalam tabulasi angka-angka dan dinarasikan secara ilmiah akan dipublikasikan didalam jurnal Nasional, atau dipublikasikan dalam bentuk publikasi buku literatur yang difaftarkan HAKI.

BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini disajikan perkembangan hasil penelitian terdahulu yang relevan variabel dan atau objek penelitiannya sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Variabel dan atau Objek Penelitiannya

	No	Judul	Peneliti /Tahun	Tempat Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan	Identifikasi	
							Variabel Relevan	Objek Relevan
	1	Sistem Terbuka Perencanaan Strategis Pembangunan Perdesaan yang Kontekstual di Riau	Sufian, 2001	Provinsi Riau	<i>Path Diagram Structural Equation Modeling (SEM)</i>	Sebaiknya perencanaan Pembangunan sistem terbuka dan Kontekstual pada potensialam dan sosial daerah	√	
	2	Pembangunan Lahan Non Produktif Pola Pertanian Terpadu, Investasi dan Kemitraan Di Provinsi Riau	Sufian, 2005	Provinsi Riau: Desa Tambak Penyengat Jaya, Mumpa	Deskriptif Analisis, Indentifikasi dan Klasifikasi	Sebaiknya Pembangunan Memanfaatkan Potensi Lahan Non Produktif Dengan Pola Pertanian Terpadu , Investasi dan Kemitraan		√

3	Pembangunan Kawasan Agrobisnis, Agroindustri, dan Agrowisata Kampong Pulau Inhu	Sufian, 2008	Kampong Pulau Inhu	Deskriptif, Indentifikasi dan Klasifikasi	Sebaiknya Pembangunan Pertanian Keterpaduan Agrobisnis, Agroindustri, dan Agrowisata		√
Sumber : Sumber Beberapa Hasil Penelitian Sebelumnya, 2019							

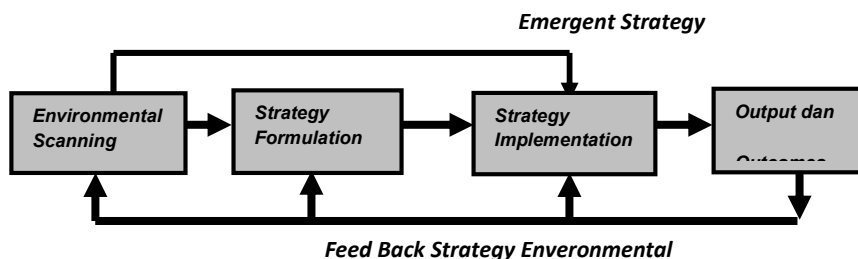
Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, penulis memberikan perbandingan secara komprehensif terhadap penelitian terdahulu. Berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah disampaikan didalam landasan penelitian terdahulu tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang akan dilaksanakan oleh penulis.

1. Judul : Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Industrialisasi Pengolahan Menjadi Pakan ternak/Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Lokasi: Kabupaten di Propinsi Riau
3. Konsep Teori: Menjelaskan Masalah Penelitian, Variabel dan Indikator digunakan konsep dan teori manajemen Strategis Pembangunan Sufian (2001), Hunger dan Willen (1996), konsep dan teori pendekatan pembangunan sufian (2005) dan Amidjojo (1995) pembangunan negara prismatis (F.W. Rigs, Coralie).
4. Teknik Analisis Data: Kuantitatif dan Kualitatif, antara lain :
 - a. Analisis Presentase
 - b. Indentifikasi dan klasifikasi
 - c. Observasi dan Ekploratori
 - d. Foto dan Vidio

2.1.2. Konsep dan Teori Manajemen Strategis Pembangunan

Penjelasan masalah penelitian secara teoritis dijelaskan dari konsep, teori dan pendekatan manajemen strategis dan teori pembangunan lain yang relevan.. Konsep, model dan proses manajemen strategis, Hunger dan Wheelen (1996), mengemukakan manajemen strategis didefinisikan sebagai *“that set of managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a corporation. It includes environmental scanning, strategy formulation (strategisc or long-range planning), strategy implementation, and evaluation and control”*. Kemudian, Ia mengemukakan bahwa suatu poroses dari manajemen strategis melibatkan empat elemen dasar yang saling berhubungan: (1) *environmental scanning*, (2) *strategy formulation*, (3) *strategy implementation*, and (4) *evaluation and control*.

Berlandaskan pada konsep, model dan proses manajemen strategis tersebut telah mengembangkannya melalui berbagai penelitian empirik, model yang dikembangkan dapat digunakan selain untuk mengurus/mengelola suatu organisasi publik maupun bisnis, dapat pula ddijadikan kerangka acuan dalam menganalisis, merumuskan dan mengimplementasikan suatu strategi dan kebijakan publik atau bisnis, sebagaimana pada gambar 2.1. sebagai berikut.



Gambar 2.1. Model Manajemen Strategis Sektor Publik dan Bisnis (Sufian)

Sumber: Disertasi (Sufian, 2001)

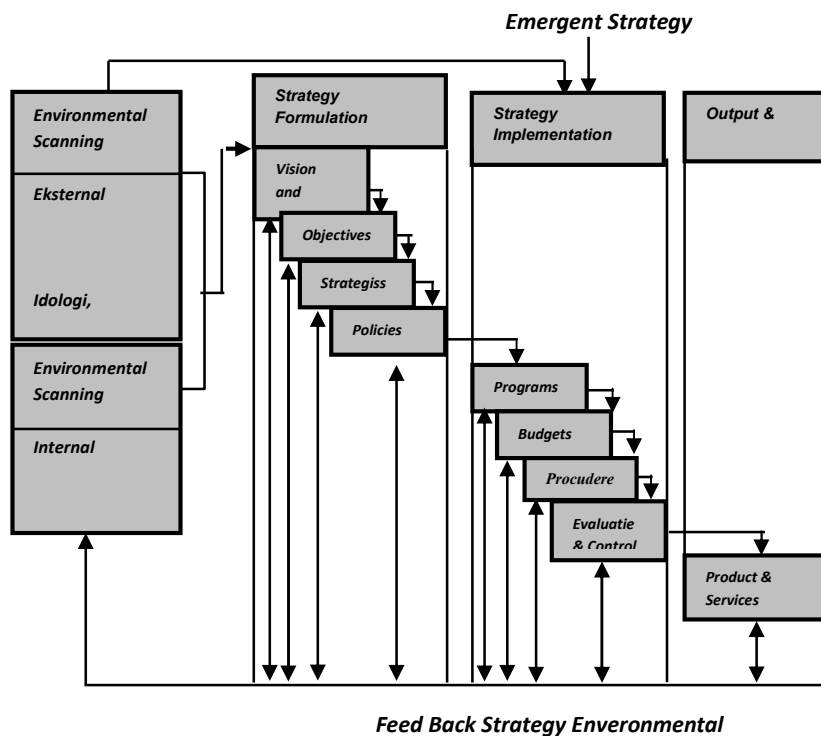
Berdasarkan gambar 2.1. dijelaskan bahwa model manajemen strategis tersebut di atas adalah suatu model manajemen yang sangat aktual dan muktahir sebelum ada pengembangan terbaru dalam menjawab permasalahan kesulitan dan bagian dari kelemahan kita untuk memprediksi kejadian masa depan dan dalam mengakomodir tuntutan lingkungan strategis yang setiap saat selalu berubah. Ada beberapa hal yang kami anggap telah dikembangkan dari model sebelumnya merupakan pengembangan terbaru, antara lain:

1. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang dan menjawab tuntutan lingkungan strategis yang setiap saat selalu berubah. Data dan informasi yang akurat dan setiap saat selalu dapat diakses sebagai bahan pengamatan lingkungan strategis (*Environmental Scanning*) harus dijadikan pedoman untuk perumusan strategi (*Strategy Formulation*) dan dijadikan pedoman pula disaat strategi di implementasikan (*Strategy Implementation*). Dengan demikian aktivitas pengumpulan data dan informasi yang akurat yang tertuang dalam data base adalah suatu prasyarat yang mutlak dan dianggap penting. Pernyataan ini sebagai gugatan terhadap daerah yang mengabaikan arti pentingnya pengembangan kelembagaan data dan informasi elektronik serta penciptaan sistem data base yang dapat menggambarkan kondisi riil daerah sesungguhnya yang dapat membantu pimpinan dalam penetapan dan mengimplementasikan kebijakan.
2. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan adalah bagian dari perumusan strategi (*Strategy Formulation*) dan merupakan rencana Jangka Panjang, Menengah dan Jangka Pendek sebagai esensi yang harus

diwujudkan. Visi sebagai rencana jangka panjang bukanlah sekedar mimpi yang tidak membumi, tetapi sebagai mimpi yang harus menjadi kenyataan. Pernyataan ini sebagai kritik terhadap visi Provinsi Riau dalam jangka waktu 20 tahun kedepan menjadi pusat perekonomian di Asia Tenggara dianggap tidak berdasar dan tidak realistis, karena tidak berdasarkan kemampuan yang telah dicapai saat ini. Ini harus dipahami bahwa proses pembangunan melalui tahapan yang berkesinambungan.

3. Evaluasi dan pengendalian merupakan fungsi pengawasan dijadikan bagian dari implementasi strategi dan bukan salah satu elemen dasar tersendiri dari manajemen strategis. Hal ini untuk mengingatkan kita akan kekeliruan pemahaman yang selama ini kita peraktekkan bahwa sering kita melakukan evaluasi dan pengendalian setelah kegiatan berakhir. Seharusnya evaluasi dan pengendalian telah dilakukan disaat atau ketika kegiatan telah dimulai, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian yang tidak diinginkan.
4. Keluaran dan hasil dari proses pencapaian tujuan harus dijadikan umpan balik melalui proses pengamatan lingkungan strategis berikutnya dan dijadikan sebagai landasan untuk perumusan strategi dan implementasi strategi selanjutnya. Karena itu proses kerja manajemen strategis diilustrasikan sebagai suatu model yang bergerak siklus dan linier sebagai perubahan yang menuju kepada kondisi yang lebih baik.

Untuk dapat lebih memahami konsep dan model manajemen strategis ini, penjabarannya diilustrasikan pada gambar 2.2. berikut ini.



Gambar 2.2. Proses Manajemen Strategis Sektor Publik dan Bisnis (Sufian)
 Sumber: Disertasi (Sufian, 2001)

Berdasarkan gambar 2.2. dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, Pengamatan Lingkungan Starategis (*Strategy Environmental Scanning*), terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal ditujukan pada variabel-variabel (*Opportunities and Threats Organization*) terdiri dari : idiologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Sedangkan Analisis lingkungan internal ditujukan pada variabel (*Strengths and Weaknesses Organization*) terdiri dari : struktur oarganisasi, budaya oarganisasi dan sumber-sumber daya organisasi, terdiri dari : manusia, uang, mesin, bahan, metode dan masyarakat/pasar.

Kedua, Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*) adalah membangun rencana-rencana jangka panjang untuk efektivitas manajemen dari peluang dan tantangan lingkungan organisasi, dalam memperjelas dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi, meliputi perumusan visi, misi-misi, tujuan-tujuan, strategi-strategi, dan kebijakan-kebijakan. Visi adalah tujuan mendasar yang ingin dicapai atau pembicaraan tentang keberadaan organisasi, mau dijadikan apa dan diarahkan kemana. Misi organisasi biasanya menceritakan “*Who we are and what we do*”. Skop besar misi aktivitas organisasi meliputi banyak tipe dari produk dan pelayanan. Tujuan adalah hasil atau akibat yang ingin dicapai dari aktivitas rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Strategi adalah suatu bentuk rencana yang menyeluruh keadaan bagaimana organisasi akan menyelesaikan atau mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah pengaliran dari strategi, memberi kebijakan sebagai pedoman umum untuk mengambil keputusan dalam proses keluaran atau mencapai tujuan organisasi.

Ketiga, Implementasi Strategi (*Strategis Implementation*) adalah suatu proses yang mana kelompok manajemen strategis menterjemahkan strategi dan kebijakan ke dalam proses tindakan implementasi program, anggaran, dan prosedur. Program adalah suatu pernyataan dari aktivitas atau langkah-langkah keinginan untuk menyelesaikan satu bagian dari rencana jangka pendek yang tertuang dalam berbagai kegiatan, dan membuat strategi tindakan nyata. Anggaran adalah suatu pernyataan atau uraian rincian biaya program dan kegiatan, yang bermanfaat bagi kelompok manajemen strategis dalam perencanaan dan pengawasan. Prosedur adalah suatu sistem langkah-langkah berikutnya atau

teknik yang menguraikan secara rinci terutama bagaimana suatu tugas yang diserahkan kepada seseorang atau pada suatu bagian untuk dapat diselesaikan.

Evaluasi dan Pengendalian adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap: menetapkan standar pekerjaan, membandingkan pekerjaan dengan standar dan menentukan perbedaannya, jika ada, segera mengoreksi penyimpangan yang tidak diinginkan melalui tindakan penanggulangan.

Dari uraian penjelasan penjabaran mekanisme kerja manajemen strategis tersebut yang dapat dijadikan kerangka acuan pembangunan nasional dan daerah, suka atau tidak suka sadar atau tidak sadar kita setiap saat dalam beraktivitas sehari-hari telah melaluinya. Hanya saja tingkat pemahaman dan pelaksanaannya jelas berbeda. Katakanlah ketika kita menyusun atau merumuskan dan mengimplementasikan Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDA), Visi Daerah, Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) atau Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (PPJP) Daerah, menyusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), dan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Daerah (APBD) yang berbasis kinerja, sebenarnya kita telah menggunakan konsep dan model manajemen strategis ini. Hanya saja tingkat kebenaran dan keakuratannya belum optimal sebagaimana yang diharapkan.

2.1.3. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah

2.1.3.1. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah

Defenisi dari pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor

swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Dalam defenisi yang lain Lincoln mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Berdasarkan tujuan utama pembangunan ekonomi daerah tersebut, maka strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu:

- Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas (Locality or Physical Development Strategy)
- Strategi Pengembangan Duia Usaha (Business Development Strategy),
- Strategi Pengembangan Sumber Daya manusia (Human Resource Development Strategy)
- Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-based Development Strategy).

2.1.3.2. Model-Model Analisis Perencanaan Pembangunan Sosial Ekonomi

Salah satu persoalan yang sering kali muncul ketika pembangunan daerah menjadi prioritas dan ketika otonomi daerah menjadi keharusan adalah “masalah interaksi” antar instansi maupun antar Daerah Otonom itu sendiri. Selama ini

akibat dari cirri strategi pembangunan yang bersifat “Executive Planning”, instansi-instansi pembuat rencana dan kebijakan pembangunan lebih cenderung mengembangkan jalur-jalur vertical, ketimbang mengembangkan koordinasi horizontal antar instansi atau antar pemerintahan pada level pemerintahan yang sama.

Pemerintah Kabupaten / Kota cenderung lebih senang membangun hubungan ke atas (Pemerintah Pusat) atau ke bawah (Kemerintah Kecamatan) di wilayahnya. Sedangkan kan hubungan yang bersifat horizontal, antar Pemerintah Kabupaten / Kota seringkali terabaikan. Padahal dalam berbagai kegiatan pembangunan banyak contoh menunjukkan dimana Kabupaten / Kota seringkali tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Artinya agar pembangunan di suatu Daerah berlangsung optimal, daerah yang bersangkutan membutuhkan suatu hubungan strategis dengan daerah lainnya, khususnya yang berada dalam suatu kawasan. Sehingga potensi-potensi yang dimiliki masing-masing daerah bisa saling mendukung untuk kemajuan bersama.

2.1.3.3 Sistem Informasi Geografi

Untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan wilayah di RIAU akan digunakan SIG. SIG merupakan alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi di mana wilayah yang memiliki pertumbuhan cepat maupun lambat. SIG pada dasarnya adalah suatu tipe sistem informasi, yang memfokuskan pada penyajian dan analisis realitas geografis. Titik beratnya adalah mengelola dan menganalisis data dengan suatu sistem informasi.

SIG pada dasarnya adalah jenis khusus sistem informasi, yang memperhatikan representasi dan manipulasi realita geografi. SIG mentransformasikan data menjadi informasi dengan mengintegrasikan sejumlah data yang berbeda, menerapkan analisis fokus, dan menyajikan output dalam rangka mendukung pengambilan keputusan (Juppenlatz & Tian, 1996: bab 1). Dalam studi ini, akan mengikuti beberapa prosedur standar dalam merancang dan menggunakan SIG, yaitu: pengumpulan data, pengolahan data awal, konstruksi basis data, analisis dan kajian spasial, dan penyajian grafis.

2.1.4. Keseimbangan Pembangunan Demokrasi Ekonomi Politik

Kemajuan ekonomi suatu masyarakat supaya dapat berkesinambungan, harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi untuk kemajuan diri termasuk menggunakan hak-hak politiknya. Prakarsa itu hanya akan tumbuh apabila ada kesempatan yang sama dan berkeadilan kepada setiap masyarakat dalam proses pembangunan.

Pembangunan demokrasi politik terutama dalam hal prakarsa, daya kreasi dan hak-hak politik masyarakat daerah dapat dikatakan belum dapat terekspresikan dengan baik. Demikian pula dalam hal partisipasi individu dan masyarakat daerah dalam proses pengambilan keputusan.

Keberadaan Pemerintah dengan kebijakan dan misinya tersediri telah membuat masyarakat daerah tidak ada pilihan kecuali hanya mengikut. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mencari penyesuaian antara keinginan arus bawah dengan keinginan pihak atas, tidak lain adalah dengan mengembangkan demokrasi politik. Upaya tersebut dimaksudkan untuk

mengurangi ketergantungan masyarakat daerah dan sekaligus mengurangi campur tangan yang berlebihan dari Pemerintah dalam proses pembangunan. Disinilah arti pentingnya pembangunan demokrasi politik di daerah dimasa yang akan datang.

Atas dasar pandangan perlu adanya daya prakarsa dan kreasi masyarakat dalam pembangunan, maka kebijakan pembangunan harus tercipta sedemikian rupa sehingga ada kebebasan dan kesempatan untuk berperan serta (berpartisipasi) dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri setiap individu dan masyarakat.

Peran serta masyarakat tidak hanya terbatas pada bidang tertentu saja, melainkan termasuk kepada semua bidang pembangunan : ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam. Singkatnya, kemajuan ekonomi suatu masyarakat tidak akan mampu bertahan, tanpa adanya pembangunan demokrasi politik dalam masyarakat tersebut.

Pembangunan sosial (*social building*) dalam rangka pengembangan sumber daya manusia tidak terlepas dari bagaimana menciptakan sistem sosial yang dapat mendorong lahirnya manusia kreatif atau manusia berprestasi, termasuk pula sikap mental masyarakat dan aparatur Pemerintah.

Selama ini pembangunan hanya difokuskan pada pembangunan fisik dan mengabaikan faktor-faktor non fisik yang justru memiliki potensi yang cukup besar untuk keberhasilan pembangunan.

Dalam perkembangannya, masih kita temukan sebahagian kegagalan dari pembangunan daerah terutama dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial yang cukup lebar yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai akibat tidak meratanya

pembagian sumber-sumber produksi. Sekelompok orang dengan mudahnya memiliki dan menguasai faktor produksi yang diperoleh dari sumber kekayaan negara dan Daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah terlalu berlebihan dan berpihak kepada sekelompok konglomerat yang dianggap memiliki peran dalam pertumbuhan perekonomian. Di pihak lain, mayoritas masyarakat usaha menengah, kecil dan koperasi tidak memperoleh akses dan kesempatan mendapatkan sumber-sumber produksi yang dikuasai negara dan Daerah akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Strategi pembangunan yang berpihak kepada rakyat (ekonomi kerakyatan) yang hanya menguasai usaha menengah dan kecil sudah sangat mendesak dilaksanakan, melalui kebijakan parampingan birokrasi dan deregulasi diberbagai peraturan, misalnya dalam pemberian kredit investasi dan modal kerja kepada usaha kecil dan ekonomi lemah harus lebih dipermudah. Tentunya, jika Pemerintah Daerah benar-benar ingin mengatasi masalah kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi dalam pembangunan dimasa yang akan datang.

Pada periode pembangunan selama pemerintahan orde lama berkuasa yang mengutamakan pembangunan politik sampai kepada lapisan terbawah di perdesaan, pada kenyataannya telah gagal menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya. Demikian pula dengan pengalaman selama pemerintahan orde baru berkuasa, juga dianggap telah gagal karena terlalu memfokuskan pada pembangunan ekonomi masyarakat semata dalam rangka mengejar pertumbuhan. Oleh karena itu sungguh sangat tepat di era reformasi Pemerintah Daerah melakukan perubahan strategi pembangunan daerah dari strategi mengabaikan

aspek pembangunan demokrasi politik menuju kepada strategi pembangunan demokrasi ekonomi bergandengan dengan pembangunan demokrasi politik.

2.1.5. Penguatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Dengan meningkatnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dan bertambahnya jumlah desa tertinggal sejak terjadinya krisis ekonomi, membuktikan bahwa hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat sampai lapisan terbawah (*trickle-down effect*) yang melekat pada paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) ternyata tidak terwujud bahkan yang terjadi justru kesenjangan semakin melebar.

Pembangunan daerah selama ini termasuk gagal dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial yang cukup lebar yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai akibat tidak meratanya pembagian sumber-sumber produksi. Sekelompok orang dengan mudahnya memiliki dan menguasai faktor produksi yang diperoleh dari sumber kekayaan negara dan Daerah sebagai akibat kebijakan Pemerintah terlalu berlebihan dan berpihak kepada sekelompok konglomerat yang dianggap memiliki peran dalam pertumbuhan perekonomian. Di pihak lain, mayoritas masyarakat usaha menengah, kecil dan koperasi tidak memperoleh akses dan kesempatan mendapatkan sumber-sumber produksi yang dikuasai negara dan Daerah akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Strategi pembangunan yang berpihak kepada rakyat (ekonomi kerakyatan) yang hanya menguasai usaha menengah dan kecil sudah sangat mendesak dilaksanakan, melalui kebijakan parampingan birokrasi dan deregulasi

diberbagai peraturan perizinan investasi, dan kebijakan ekonomi yang sebelumnya tertumpu pada sektor industri di Batam, Kepri dan Bintan, setelah wilayah tersebut tidak lagi menjadi bagian Riau, maka strategi kebijakan pembangunan sebaiknya memfokuskan pembangunan perkebunan dan pertanian yang menopang industri pengolahan. Selanjutnya membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara petani diwadahi KUD dengan perusahaan besar sebagai pemilik modal dan pabrik pengolahan. Tugas pemerintah daerah sebagai fasilitator, mediator, pengaturan dan pembimbingan secara teknis diserahkan kepada dinas, perguruan tinggi dan LSM.

Pemberdayaan masyarakat perdesaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, melainkan termasuk pula membangun pranata-pranatanya, dalam hal menanamkan nilai-nilai budaya modern misalnya kerja keras, keterbukaan, hemat, dan bertanggung jawab. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial daerah dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya melalui proses pembelajaran.

Pengembangan ekonomi yang berakar pada kerakyatan tetap pula mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas dan peningkatan sumber daya manusia. Selain itu perlu pula mempercepat berbagai proses perubahan dari masyarakat daerah yang masih berpikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern, dari sistem ekonomi yang subsistem ke ekonomi pasar, dan dari ketergantungan masyarakat terhadap pemberi bantuan menuju kemandirian dan pemberdayaan. Dalam hal ini sasaran ekonomi kerakyatan di daerah tidak lain

adalah petani dan nelayan. Dalam kebijakan ekonomi kerakyatan, petani harus diberi hak kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah sebagai lahan pertanian, disediakan pula fasilitas kredit untuk permodalan dan teknologi tepat guna dalam rangka efektivitas berusaha.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan menghidupkan dan memfungsikan kembali lembaga-lembaga dalam masyarakat yang mendukung perekonomian masyarakat. Misalnya KUD, Bank Daerah, Pasar dan pengadaan sarana produksi dan distribusi. Apabila semua masyarakat usahanya sudah diwadahi oleh KUD yang didukung pula oleh pengadaan sarana produksi dan distribusi, sementara Bank Daerah atau lembaga keuangan lainnya menyediakan fasilitas kredit untuk modal usaha dan modal kerja maka diharapkan masyarakat lebih akses dan berdaya dalam berusaha.

Penumpukan produksi dapat pula diatasi apabila KUD benar-benar berfungsi tidak saja sebagai wadah produksi, melainkan juga sebagai penyalur (distribusi) produk daerah ke pasar lokal, regional bahkan ke pasar Internasional.

Dalam perkembangannya, keberadaan investor di daerah sering menimbulkan konflik antara pemilik modal dengan petani sebagai pemilik lahan. Pada sisi yang lain, keberadaan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka pemanfaatan potensi alam dan tenaga kerja sangat diharapkan masyarakat. Jalan tengah yang terbaik sebagai solusinya adalah perencanaan pembangunan harus pula menciptakan kerjasama dan saling ketergantungan (*komensalisme*) antara investor dan petani.

Efektivitas penerapan teknologi daerah dapat dicapai dengan cara memadukan teknologi sendiri dengan teknologi dari luar, karena dianggap lebih cepat tingkat pemahaman dan diharapkan lebih efektif dan efisien. Upaya penerapan inovasi dan teknologi di daerah, membutuhkan suatu strategi adaptasi antara modernisasi dengan tradisi.

Penguatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara :

Pertama, Peningkatan sumber daya manusia. Sebagaimana telah diketahui ada dua kelompok pelaku dalam pembangunan yaitu Pemerintah dan masyarakat. Kedua pelaku pembangunan ini adalah sama-sama penting dan memberikan akses bagi pembangunan. Kedua pelaku pembangunan ini sama-sama perlu ditingkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Walaupun dipihak Pemerintah telah cukup memadai kemampuan daya pikir dan nalarnya dalam berkeaktivitas, namun dipihak masyarakat dirasakan masih banyak kelemahan, jika dilihat dari sisi sumber daya manusianya. Oleh karena itu dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani dan nelayan, dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam berusaha. Selain itu instansi yang terkait menyangkut masalah kegiatan pertanian harus pula rutin dan lebih serius lagi dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan.

Kedua, Redistribusi Asset lahan pertanian. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, faktor pemilikan lahan oleh petani sangat penting, dan justru perlu pengaturan, pembagian, dan penataan kembali kepemilikan hak-hak atas tanah.

Selain perusahaan-perusahaan besar Pemerintah (BUMN) dan swasta yang menguasai lahan untuk perkebunan dengan areal yang begitu luas, meskipun hanya dengan hak guna usaha atau hak pakai dan sebahagian lagi penduduk kota yang begitu banyak menguasai lahan yang tidak produktif maksudnya tidak diusahakan, melainkan hanya untuk memperoleh keuntungan dari hasil jual-beli sebagai pakang tanah. Sementara pada sisi yang lain petani kita yang ingin melakukan kegiatan usaha pertanian tidak mempunyai cukup lahan, sebagai akibat tidak mampu untuk membelinya atau tidak memiliki modal untuk membuka lahan baru. Dimasa yang akan datang, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanahan harus benar-benar melakukan pemetaan, pembagian dan penggunaan lahan pertanian secara transparan dan seadil-adilnya, sehingga lahan-lahan yang tidak produktif dapat diserahkan kepada masyarakat yang tidak memiliki atau lahannya sangat sempit untuk kegiatan berusaha.

Ketiga, Menyediakan Fasilitas Permodalan. Selain masalah lahan pertanian, petani di daerah, perlu pula memiliki modal dalam arti dana untuk investasi dan modal kerja. Jika tidak ada dana, sudah barang tentu petani tidak akan mungkin memiliki peralatan, bibit tanaman yang unggul, pupuk, racun hama dan biaya hidup selama kegiatan produksi. Untuk itu Pemerintah Daerah harus membuat program bantuan permodalan sebagai upaya mengatasi kesulitan permodalan petani dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan. Program permodalan petani untuk kegiatan berusaha, dapat dilakukan Pemerintah melalui kebijakan kredit lunak melalui bank milik Pemerintah Daerah, misalnya melalui

Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau program bantuan khusus disalurkan kepada KUD atau Bank Desa yang telah dibentuk dan dibina secara mapan.

Keempat, Pengadaan dan penerapan teknologi. Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dan membutuhkan banyak modal, pengetahuan khusus dan teknologi tepat guna. Dengan penggunaan teknologi, misalnya : bibit unggul, pupuk, racun hama, dan peralatan mekanik, kegiatan pertanian diharapkan lebih efisien dan produktif. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan, petani secara menyeluruh harus dapat menikmati penggunaan bibit unggul, pupuk, racun hama, dan peralatan mekanik yang mudah didapat dan dengan harga yang relatif terjangkau oleh petani. Semua teknologi tersebut seharusnya tetap selalu tersedia, namun dalam kenyataannya di daerah teknologi tersebut sangat sulit didapat dan harganya pun relatif cukup tinggi, terutama peralatan mekanik untuk kegiatan pengolahan lahan dan untuk kegiatan pasca panen. Karena itu kebijakan pengembangan dan penemuan baru di bidang teknologi pertanian harus tetap selalu ditingkatkan, dalam rangka produktivitas, efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha tani. Upaya tersebut dapat dilakukan apabila Pemerintah Daerah mau bekerjasama dengan lembaga riset dan teknologi melalui berbagai perguruan tinggi yang ada di Daerah.

Kelima, distribusi dan pemasaran hasil produksi. Setelah kegiatan produksi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan distribusi dan pemasaran hasil produksi harus ditata sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa setiap hasil pertanian tetap terjual di pasaran lokal, regional dan internasional. Untuk itu

Pemerintah Daerah harus menciptakan pengaturan dalam rangka memasarkan produk pertanian di daerah. Pemasaran lokal diserahkan kepada Koperasi Unit Desa dan pemasaran regional dan internasional harus ada koordinasi antara instansi terkait, misalnya: Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Badan Gugus Kendali Mutu, termasuk pula Badan yang mengatur kegiatan Ekspor-Inpor.

Keenam, Pemberdayaan koperasi. Perubahan mendasar pada fungsi koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan adalah dengan telah dikeluarkannya UU. No. 25 Tahun 1992, bahwa koperasi tidak lagi semata-mata sebagai organisasi ekonomi bertujuan sosial melainkan sebagai organisasi ekonomi yang mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang dimaksud, struktur koperasi termasuk KUD di Daerah yang selama ini kurang efektif perlu dilakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Tidak saja perluasan usaha, manajemen yang baik, struktur modal yang kuat sampai kepada peningkatan sumber daya manusia pengurus dan keanggotaannya. Dengan demikian, strategi pemberdayaan koperasi, seharusnya diarahkan kepada : *Pertama*, posisi, peran dan fungsi Pemerintah Daerah haruslah mendorong peran serta, efisiensi, dan produktivitas masyarakat melalui koperasi; *Kedua*, meningkatkan kegairahan, kesadaran, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat; *Ketiga*, meningkatkan kemitraan usaha diantara sesama lembaga koperasi, dan antara koperasi dengan usaha swasta dan BUMN lainnya; dan *Keempat*, menciptakan iklim berusaha yang mendukung tumbuhnya koperasi secara sehat dan mandiri.

Ketujuh, Membangun kemitraan berusaha. Dalam perkembangan perekonomian masyarakat daerah diDaerah, sangat dirasakan adanya kepincangan struktural, antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah. Kesenjangan itu merupakan akibat dari tidak meratanya pemilikan sumber daya produksi dan produktivitas usaha, serta sistem distribusi dan pemasaran diantara pelaku ekonomi. Untuk memecahkan masalah ini menuntut perlu dilakukannya kemitraan berusaha, dan bukan ketergantungan dan persaingan yang tidak sehat. Kemitraan berusaha yang dimaksud adalah dalam rangka penciptaan hubungan kerja antara pelaku ekonomi yang didasarkan kepada ikatan yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sejajar, dilandasi oleh prinsip saling menunjang, dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Pengalaman telah membuktikan bahwa dalam berusaha masing-masing pihak tetap saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, atas dasar kelebihan dan kelemahan ini setiap usaha dituntut untuk selalu berkerjasama dan bermitra. Justru disinilah arti penting ekonomi kerakyatan. Usaha yang besar dan usaha kecil saling membutuhkan dan saling berkerjasama dalam rangka mencapai produktivitas dan efisiensi dalam persaingan yang sehat. Dalam sistem perekonomian yang kita anut sebenarnya tidak ada persaingan bebas yang tidak seimbang, yang ada hanyalah persaingan sehat berupa perlombaan untuk mencari yang terbaik dan bermanfaat bagi semua pihak. Usaha yang satu harus dapat menunjang usaha yang lain, dan tentunya merupakan bahagian dari yang lain. Perusahaan yang besar menopang dan mendorong yang kecil agar tumbuh besar, dan yang kecil membantu yang besar dalam penyediaan berbagai kebutuhan

bahan mentah dan lain sebagainya. Pada akhirnya menciptakan suatu totalitas sistem usaha bersama untuk kesejahteraan bersama. Pengalaman telah membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada perusahaan yang maju dan menjadi besar sendiri meninggalkan usaha-usaha lain yang kecil. Semua berhubungan, terkait dan interdependensi. Model kemitraan berusaha yang dimaksud dapat berupa hubungan yang saling menguntungkan (*komensalismo*), misalnya petani perkebunan kelapa sawit di Daerah menyediakan bahan mentah, sedangkan pabrik selain menyediakan kebutuhan petani sekaligus mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau menghasilkan minyak goreng untuk dipasarkan pada pasar lokal, regional dan internasional. Bentuk hubungan kerjasama ini dapat saja diterapkan pada hubungan antara petani dengan KUD yang memiliki pabrik pengolahan barang-barang produksi. Dengan demikian, kemitraan usaha ini diharapkan pula dapat memberantas atau mengurangi kegiatan monopoli dan oligopoli dari sekelompok orang yang perekonomiannya yang sudah sangat kuat dalam masyarakat. Selanjutnya dalam kemitraan usaha, selain saling menguntungkan, juga harus adil dan dinamis. Adil, dalam arti kemitraannya tidak memberatkan kepada salah satu pihak. Dinamis, dalam arti tidak terpaku pada suatu keadaan, tetapi senantiasa disesuaikan dengan tuntutan keadaan situasi dan kondisi setempat, sehingga efektivitas, produktivitas, dan kualitas usaha kemitraan senantiasa tetap terjaga. Sampai saat ini, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan ternyata konsep kemitraan berusaha di Daerah belum terlaksana dengan baik, karena itu diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat proses sosialisasi kemitraan berusaha. Peranan Pemerintah Daerah dalam hal ini

adalah membuat kebijakan, memfasilitasi pertemuan dan dialog antara perusahaan-perusahaan besar Pemerintah (BUMN) dan swasta dengan petani sebagai pemilik lahan, tentang kemitraan berusaha.

Kedelapan, Konsistensi Penerapan kebijakan anti monopoli, oligopoli dan kartel. Dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, tidak dibenarkan adanya praktek-praktek monopoli, oligopoli dan kartel. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi dan keadilan. Kegiatan monopoli sudah barang tentu tidak efisien, karena pelakunya secara sengaja membatasi keluaran dan membebankan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika keluaran atau produksi itu dihasilkan dalam kondisi persaingan yang murni dan sempurna. Oleh sebab itu dapat ditegaskan disini bahwa monopoli atau sejenisnya seperti perusahaan-perusahaan BUMN adalah tidak efisien jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang murni bersaing, karena BUMN menghasilkan terlalu sedikit dengan beban biaya yang tinggi. Berkurangnya persaingan atau kompetisi yang didukung oleh adanya subsidi Pemerintah, telah menyebabkan perusahaan-perusahaan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dituduh sebagai perusahaan yang dijalankan dengan manajemen yang kurang baik, tidak efisien dan dicemari oleh akses-akses birokrasi, korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela. Oleh karena itu usaha apaun, besar atau kecil termasuk perusahaan-perusahaan negara atau perusahaan Daerah yang kegiatannya berbau monopoli, harus diswastakan (privatisasi) murni dan dipaksa untuk dapat bersaing di pasaran yang bebas. Demikian pula halnya dengan kegiatan kartel, tidak dibenarkan ada dan berkembang dalam sistem perekonomian kerakyatan. Kegiatan kartel hanya

menciptakan kelompok-kelompok usaha yang kecenderungannya dikuasai oleh sekelompok masyarakat saja, sedangkan sebahagian besar masyarakat yang lainnya tidak mendapatkan akses dan kesempatan untuk berusaha. Untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek monopoli, oligopoli dan kartel ini, Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus lebih serius melaksanakan undang-undang tentang pelarangan kegiatan monopoli, oligopoli dan kartel dalam setiap dunia usaha.

2.1.6. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kemajuan ekonomi suatu masyarakat supaya dapat berkesinambungan, harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi untuk kemajuan diri termasuk menggunakan hak-hak politiknya. Prakarsa itu hanya akan tumbuh apabila ada kesempatan yang sama dan berkeadilan kepada setiap masyarakat dalam proses pembangunan.

Atas dasar pandangan perlu adanya daya prakarsa dan kreasi masyarakat dalam pembangunan, maka kebijakan pembangunan sebaiknya mampu menumbuhkan kebebasan dan kesempatan untuk berperan serta (berpartisipasi) dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri setiap individu dan masyarakat.

Pembangunan sosial (*social building*) dalam rangka pengembangan sumber daya manusia tidak terlepas dari bagaimana menciptakan sistem sosial yang dapat mendorong lahirnya manusia kreatif atau manusia berprestasi, termasuk pula sikap mental masyarakat dan aparaturnya Pemerintah.

Selama ini pembangunan hanya difokuskan pada pembangunan fisik dan mengabaikan faktor-faktor non fisik yang justru memiliki potensi yang cukup besar untuk keberhasilan pembangunan. Pendekatan pembangunan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia daerah, dapat dilakukan yaitu melalui penyuluhan, pelatihan, swadaya terpadu dan pembangunan terpadu. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dipandang sebagai bagian pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial, karena itu investasi harus diarahkan bukan saja untuk meningkatkan mutu pendidikan, melainkan juga kesehatan dan gizi.

Selain itu satu kelemahan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dalam mengidentifikasi, menemukan masalah pembangunan, kita tidak memiliki data base Riau yang lengkap, akurat, benar dan selalu tersedia, sehingga dalam memformulasikan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan masih meraba-raba atau main lantak saja, kurang terukur dan tidak konsisten dengan dokumen perencanaan lainnya termasuk visi, pola dasar dan renstrada. Tidak jarang hasil pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak mengarah kepada pencapaian visi, misi dan tujuan semula. Selain itu sistem anggaran pendapatan dan belanja pembangunan daerah belum sepenuhnya menggunakan skala prioritas, belanja rutin lebih besar porsi nya bila dibandingkan dengan belanja pembangunan sehingga politik anggaran tidak ekonomis dan kurang produktif.

Pembangunan sumber daya manusia selain melalui penguasaan wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi, juga perlu pelatihan

dan kursus keterampilan kepada petani dan nelayan. Dalam waktu bersamaan juga perlu tetap meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat.

2.1.7. Strategi Pengembangan Usaha Ekonomi Pertanian Perdesaan

Dalam kerangka acuan pembangunan nasional, pembangunan yang memberdayakan masyarakat di perdesaan harus menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab bersama. Membangun masyarakat perdesaan berarti pula membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Selain memiliki potensi sumber daya manusia, perdesaan juga memiliki potensi sumber daya alam.

Dengan demikian pembangunan masyarakat pedesaan Indonesia harus menjadi pusat perhatian yang lebih serius, terencana, terpadu dan berkesinambungan, serta dipercepat prosesnya, sebagaimana telah ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999–2004 sebagai TAP MPR No. IV/ MPR /1999 (huruf G angka 1. d), bahwa perlu percepatan pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan program prasarana, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pendekatan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat yang berdasarkan situasi kondisi internal dan eksternal merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan, antara lain berupa potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, tidak dapat diabaikan.

Strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan potensi yang ada di perdesaan, tentunya tidak efisien, mengingat

pada kenyataannya perdesaan di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik antara satu Desa dengan Desa yang lain.

Dengan mengacu pada beberapa teori pertumbuhan ekonomi dari berbagai aliran, maka setidaknya-tidaknya ada beberapa faktor yang harus ada selalu tersedia dan berfungsi pada masyarakat perdesaan, diantaranya :

1. Tenaga kerja yang terampil dan sehat, pembentukan melalui peningkatan sumber daya manusia.
2. Petani yang memiliki tanah (lahan) melalui kebijakan landreform dan redistribusi asset.
3. Dana untuk investasi dan modal kerja, melalui penyediaan kredit jangka panjang dan kecil tingkat suku bunga yang disediakan bank pemerintah atau koperasi desa.
4. Seperangkat aturan yang mencegah terjadinya monopoli /persaingan yang tidak sehat dan iklim sosial politik yang kondusif.
5. Jaminan distribusi dan pemasaran hasil-hasil usaha di perdesaan.
6. Teknologi tepat guna (yang disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik sosial ekonomi desa).
7. Pembagian kerja (usaha) secara lokal, regional dan nasional, melalui perkembangan spesialisasi produksi yang sesuai dengan sumber-sumber setempat.
8. Dukungan kebijakan dan kemampuan politik dari pemerintah.
9. Berfungsinya lembaga-lembaga dalam masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa rencana maupun program pembangunan ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, dan lain-lain harus disesuaikan dengan potensi sosial dan potensi alam setempat yang ada di desa serta didukung oleh pengusaha besar, kemudian dikaitkan pula dengan peluang-peluang pasar lokal, regional, nasional dan pasar internasional.

Untuk mewujudkan rencana dan program yang demikian dibutuhkan dukungan sumber dana dan manusia dari berbagai pihak : Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Perusahaan Besar, Perbankan, Balai Pelatihan, Koperasi, LSM dan lain sebagainya dalam rangka pembinaan masyarakat tani dan nelayan di perdesaan.

Sebenarnya peruntukan dan Rp 500 juta perdesa tertinggal, merupakan bagian dari penyediaan dukungan dana dari Pemerintah Daerah Riau, seharusnya juga sinergik dengan dana yang disediakan Kabupaten/Kota. Pemanfaatan dana ini konsepnya harus jelas dan sangat mengawatirkan jika diserahkan langsung kepada petani, apabila tanpa pengarahan dan pembinaan kepada petani tersebut. Berdasarkan pengalaman masa lalu dana PEK dan IDT, dana ini dapat beralih dari tujuan semula produktif menjadi konsumtif, bahkan terjadi kebocoran di tingkat birokrasi. Pendamping yang dipilih sebaiknya menggunakan Lembaga Perguruan Tinggi, LSM yang memiliki integritas bekerjasama dengan instansi terkait.

Dukungan dana dan pembinaan diperlukan masyarakat tani dan nelayan terutama ditujukan pada manajemen usaha, pengolahan lahan, efisiensi dan efektivitas berusaha, dan bantuan teknologi termasuk pembinaan memasarkan

produk. Semuanya itu dilakukan dalam rangka proses pembelajaran dan pemberdayaan dalam rangka kemandirian masyarakat tani dan nelayan.

Untuk tahap awal, sebelum program ini diperuntukkan untuk semua desa, diperlukan suatu pelaksanaan program untuk desa-desa percontohan. Tahap pertama dilakukan kajian analisis potensi alam dan potensi masyarakat setempat untuk membuat suatu proyek desa percontohan dalam rangka mengembangkan jenis-jenis usaha apa saja yang perlu dikembangkan yang dilakukan secara terintegral dan terpadu dan memerlukan dukungan dana dan pembinaan dari perguruan tinggi, LSM, swasta perkebunan besar, dan instansi terkait.

Pada tahap berikutnya disediakan, modal kerja dalam bentuk sarana produksi yang dibutuhkan petani, setelah itu dilakukan pembinaan, yaitu : melakukan pemilihan usaha yang berbasiskan potensi desa dan dikaitkan dengan peluang pasar (*market*); melakukan pelatihan terhadap SDM petani, memberikan dukungan finansial, pengolahan lahan decara mekanik dalam skala luas, pembinaan lembaga Koperasi, dan penerapan teknologi. Kesemuanya itu diharapkan melahirkan suatu desa yang dapat dijadikan contoh dalam pengembangan usaha pertanian terpadu yang memiliki efek ganda (*multi efec*) dalam rangka pengurangi tingkat kemiskinan dan kebodohan.

Ada beberapa hal penting yang harus dianalisis apabila akan mengembangkan usaha di desa dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan dan kebodohan antara lain :

1. Apa potensi alam dan sosial suatu komunitas masyarakat atau desa;

2. Jenis usaha apa saja yang perlu dikembangkan dikaitkan dengan potensi alam dan sosial pada suatu komunitas setempat atau pada suatu desa yang dikaitkan dengan peluang pasar;
3. Bagaimana pembinaan yang harus dilakukan terhadap petani atau masyarakat miskin dalam berusaha;
4. Bagaimana mengoptimalkan dukungan finansial dari pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Pusat sehingga penggunaan dana tidak konsumtif, tetapi memiliki nilai ganda dalam rangka penyediaan modal kerja, pembinaan SDM petani dan penerapan teknologi pertanian.

Dari potensi, kelemahan, peluang dan tantangan pengembangan usaha masyarakat di desa tersebut di atas, apabila dikaji karakteristik pengembangan usaha di Provinsi Riau dapat saja berupa pembukaan perkebunan dalam skala luas dengan kebijakan redistribusi asset kepada petani dan nelayan atas dasar dukungan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat dan pertimbangan karakteristik potensi alam dan berorientasi kepada pasar (*market*).

Salah satu strategi yang diterapkan adalah seluruh kegiatan perkebunan dan pertanian dipusatkan pada suatu KUD sebagai pusat lembaga perekonomian dan seluruh peserta program wajib menjadi anggotanya. Ini adalah merupakan proses pemberdayaan masyarakat. Dimana pada suatu ketika masyarakat sudah mampu mengrus usahanya maka KUD beserta assetnya akan diserahkan. Hal ini atas dasar konsep, bahwa pemberdayaan masyarakat akan terjadi apabila :

1. Dalam jangka waktu tertentu masyarakat harus mampu berusaha sendiri;
2. Pada tahap awal diberikan modal dan pembinaan;

3. Pemerintah, Lembaga perguruan Tinggi, Pengusaha (investor) dan LSM, bertindak sebagai agen perubahan (pembangunan) dengan menyediakan kebutuhan usaha masyarakat, berupa:
 - a. investasi dan modal kerja dengan cuma-cuma atau kredit lunak tanpa bunga;
 - b. Bantuan dan Penyediaan mekanisasi pertanian, teknologi (bibit unggul, pupuk dan racun hama penyakit, dsbnya);
 - c. Tenaga ahli sebagai pembina/pendamping;
 - d. Membantu proses terbentuknya Organisasi/Lembaga Ekonomi berupa KUD;
 - e. Memberikan pelatihan dan keterampilan secara cuma-cuma;
 - f. Memberi motivasi dan etos kerja;
 - g. Membantu dalam memasarkan hasil produksi.
 - h. Pemerintah, perguruan tinggi dan LSM, berkewajiban menjembatani pola kemitraan (saling menguntungkan) antara petani dengan pengusaha perkebunan, tanaman pangan dan perikanan, petani sebagai pelaksana pengadaan bahan baku dan Perusahaan menyediakan pabrik pengolahan (agro industri).

Usaha yang dapat dilakukan dapat berupa perkebunan kelapa sawit atau jenis tanaman perkebunan apapun dalam skala luas yang sesuai dengan kondisi lahan dan budaya bertani masyarakat lokal yang diminta pasar lokal, domestik, nasional dan internasional (ekspor), diharapkan sebagai penghasilan untuk jangka panjang. Sedangkan usaha lain sebagai tumpang sari atau melengkapi, misalnya

ternak ayam potong, tanaman sayuran dan buah-buahan merupakan penghasilan jangka pendek.

Dasar pemikirannya adalah sambil menunggu 4-5 tahun sawit berproduksi, penghasilan tanaman tumpang sari dan ternak ayam potong atau kolam ikan diharapkan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau konsumsi masyarakat lokal. Selain itu pupuk kandang ayam potong dapat bermanfaat untuk pupuk kandang perkebunan kelapa sawit.

Namun demikian setelah 4-5 tahun, apabila tanaman perkebunan jangka panjang sudah menghasilkan maka masyarakat sebagai peserta program sekarang harus mengembalikan biaya atau modal yang telah diterimanya kepada KUD dengan cara mencicil perbulan tanpa dikenakan biaya bunga dalam jangka waktu yang sangat meringankan. Ikatan ini dilakukan dalam suatu surat perjanjian, dengan jaminan kebunnya. Kemudian dana yang terkumpul di koperasi setelah 8-10 tahun selain untuk pengembangan usaha digulirkan kembali kepada masyarakat yang belum menerima program dengan pelaksanaan program menggunakan sistem yang sama.

Organisasi Pengembangan usaha terdiri dari :

1. Organisasi Pembina adalah Pemerintah, Perguruan Tinggi dan LSM, sedangkan Pelaksana Utamanya Koperasi Unit Desa (KUD) Desa. Segala kebutuhan dan hasil produksi pertanian terpusat di KUD, dan setiap anggota penerima program wajib menjadi anggotanya.
2. Organisasi Pembina Pendamping adalah :Dinas Daerah Terkait, dalam hal ini sebagai tenaga teknis dan penyuluh lapangan, antara lain misalnya : Dinas

Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, Pertanahan, Kimpraswil, Pasar, Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

3. Organisasi Pengawas adalah Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan Bawasda adalah sebagai pengawas program.
4. Peserta yang menerima program adalah masyarakat miskin yang berada di Desa.

Pemilihan dan penunjukan yang menjadi peserta program dilakukan dengan penyebaran Instrumen, wawancara dan pengamatan langsung terhadap masyarakat berupa aktivitas dan tempat tinggalnya. Proritas yang menerima program adalah masyarakat yang miskin yang sudah berkeluarga dan sudah menetap minimal 5 tahun, selain tidak memiliki usaha yang tetap, pendapatan rendah, tempat tinggal yang kurang memadai, juga dipertimbangkan mereka yang memiliki semangat kerja cukup tinggi. Atas dasar kriteria tersebut disusun daftar nama yang menerima program, dan tidak begitu perlu pemetaan kemiskinan yang datanya tidak akurat kalau hanya dibuat dalam 2-3 bulan.

Daftar nama tersebut akan di cek lagi secara faktual di lapangan apakah benar-benar masyarakat miskin, jika masih ada masyarakat yang lebih berhak menerima bantuan program ini maka namanya akan diganti pada calon peserta yang lebih berhak menerimanya.

2.1.8. Strategi Pengembangan SDM di Perdesaan

Dengan demikian investasi sumber daya manusia akan menghasilkan manfaat ganda. Sedangkan mekanisme kelembagaan yang paling penting bagi pengembangan keterampilan masyarakat adalah sistem pendidikan nonformal.

Peningkatan kesempatan pendidikan kuantitatif dan kualitatif yang cepat akan merupakan kunci pokok pembangunan masyarakat perdesaan.

Permasalahan yang sangat mendasar tentang pendidikan di perdesaan adalah kurang sesuainya sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Ini disebabkan, sistem pendidikan hafalan, pengulangan dan pengalaman, bukannya pemikiran, penalaran atau pemecahan masalah. Jadi sekolah-sekolah dasar amat terbatas waktunya untuk memberikan bekal pengetahuan kecakapan dan gagasan-gagasan baru yang sangat dibutuhkan murid agar bisa berfungsi secara efisien di dalam lingkungan perdesaan, misalnya praktek pertanian dan pengelolaannya, kesehatan, nutrisi, pembangunan komunikasi dan sebagainya. Yang menjadi prioritas hanya membaca, menulis, berhitung dan bahasa asing, sesungguhnya kebanyakan mereka bukan dipersiapkan untuk melanjutkan keperguruan tinggi. Misalnya, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dengan tarap kehidupan keluarga yang rendah, sering gagal dalam menyelesaikan pendidikan.

Ada empat faktor paling penting yang merupakan determinasi terhadap kemampuan belajar anak-anak, yaitu :

1. Lingkungan keluarga, termasuk tingkat penghasilan, pendidikan orang tua, kondisi perumahan, jumlah anak dalam suatu keluarga, dan sebagainya.
2. Interaksi kelompok sebaya, yaitu tipe anak-anak dengan siapa seseorang anak berhubungan.
3. Keperibadian, yaitu inteligensia dan kecapan yang diturunkan kepada anak.
4. Nutrisi dan kesehatan selama bertahun-tahun awal.

Setidaknya ada beberapa manfaat dari investasi sumber daya manusia di perdesaan, antara lain : mendorong pertumbuhan ekonomi, terciptanya angkatan kerja terdidik, memacu sikap-sikap modern masyarakat, dan mengurangi tingkat kesuburan wanita.

Banyak pendidikan di masyarakat desa di negara-negara berkembang hanya sedikit sumbangannya di dalam memperbaiki tingkat produktivitas pertanian alam atau di dalam membuat murid bisa belajar lebih efektif di lingkungan masyarakatnya.

Sebenarnya ada empat kelompok pendidikan yang diperlukan penduduk usia muda dan dewasa, laki-laki dan perempuan, dalam empat bagian sebagai berikut:

1. Pendidikan umum atau pendidikan dasar, membaca, menulis, berhitung, lingkungan hidup dan sebagainya.
2. Pendidikan kesejahteraan keluarga, untuk mendalami pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang berguna untuk memperbaiki kualitas kehidupan keluarga termasuk kesehatan, nutrisi, rumah sakit, perawatan anak, membangun rumah dan memperbaikinya, keluarga berencana, dan sebagainya.
3. Pendidikan kesejahteraan masyarakat, dirancang untuk memperkuat lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik lokal maupun nasional, LMD, LKMD, koperasi, proyek kemasyarakatan dan upaya serupa.

4. Pendidikan keterampilan kerja, dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan kecapaian khususnya yang berkaitan dengan efektivitas ekonomi dan yang bermanfaat bagi usaha membina kehidupan.

Untuk mencapai tingkat keberhasilan peningkatan SDM, akan ditunjukkan betapa kebutuhan terhadap pendidikan berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain di lingkungan perdesaan. Program-program pendidikan yang efektif dan diatur dengan baik secara cocok untuk semua kelompok pekerja adalah sangat diperlukan jika pendidikan dimaksudkan sebagai sarana penunjang yang penting bagi pembangunan perdesaan.

Sebaiknya melakukan empat pendekatan untuk meningkatkan sumber daya manusia perdesaan, diantaranya:

1. Pendekatan penyuluhan, berusaha merubah pertanian subsistensi menjadi suatu masyarakat yang dinamik, dan meningkatkan suatu taraf hidup keluarga dan masyarakat.
2. Pendekatan pelatihan/pendidikan, pengajaran yang sistematis serta mendalam untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dasar tertentu.
3. Pendekatan swadaya terpadu, merubah watak, sikap penduduk terhadap pembaharuan dan hasrat mereka akan perbaikan nasib.
4. Pendekatan pembangunan terpadu, sifatnya beraneka ragam dan tegas dalam memilih metode pendidikannya. Suatu pandangan yang luas mengenai proses pembangunan dan cara mengkoordinasi dalam rangka satu sistem pengelolaan tunggal segala komponen penting.

Dengan demikian jelaslah bahwa secara konvensional pembangunan sumber daya manusia diartikan sebagai investasi ‘*human capital*’ yang harus dilakukan sejalan dengan investasi *physical capital*.

Cakupan pembangunan sumber daya ini meliputi pendidikan, pelatihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, dan pengembangan *entrepreneurial*, yang kesemuanya bermuara kepada peningkatan produktivitas manusia. Karenanya dikatakan kinerja pembangunan sumber daya manusia mencakup indikator pendidikan, pelatihan, kesehatan, gizi, dan sebagainya yang disebut di atas tadi.

Namun, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya terbatas pada hanya untuk membuat manusia profesional dan terampil yang sesuai dengan kebutuhan sistem untuk dapat memberikan kontribusinya di dalam proses pembangunan interpretasi pengembangan sumber daya manusia lebih luas lagi.

Pembangunan sumber daya manusia menjangkau dimensi yang lebih luas yang menekankan pentingnya kemampuan manusia untuk ikut berpartisipasi dalam proses transformasi masyarakatnya dimana mereka hidup bukan suatu struktur yang statis, tertutup, suatu realita yang harus diterima saja, tetapi menuntut mereka untuk beradaptasi sepenuhnya kepada sistem.

Pembangunan sumber daya manusia masyarakat perdesaan tidak sekitar pendidikan, kesehatan dan gizi, akan tetapi membentuk manusia yang mempunyai kemampuan kritis untuk melihat kendala-kendala sosial, ekonomi, politik, kultural dan sebagainya dari sistem sosial yang ada, dan mencari alternatif-alternatif pemecahan. Jadi menyangkut pula membentuk mental yang baik, sikap kritis dan pola pikir berlian, selalu ingin maju dan berprestasi, tumbuh jiwa wiraswasta,

punya ide-ide cemerlang, pandangan kedepan menyongsong hari esok dan mampu sebagai agen pembangunan. Apabila sudah memiliki tingkat sumber daya yang demikian, diharapkan pula dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk menggali dan mengembangkan teknologi pribumi (*endogenous technology*) yang dimilikinya, dengan memberikan peningkatan kepada kemampuan sosial ekonominya.

Strategi penguatan ekonomi kerakyatan yang hanya menguasai usaha kecil, menengah dan koperasi sudah sangat mendesak dilaksanakan, melalui kebijakan perampingan birokrasi dan deregulasi diberbagai peraturan perizinan investasi, dan kebijakan ekonomi yang memfokuskan pembangunan perkebunan dan pertanian yang menopang industri pengolahan. Selanjutnya membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara petani diwadahi KUD dengan perusahaan besar sebagai pemilik modal dan pabrik pengolahan. Tugas pemerintah daerah sebagai fasilitator, mediator, pengaturan dan pembimbingan secara teknis diserahkan kepada dinas, perguruan tinggi dan LSM.

Selanjutnya dengan strategi pembangunan sumber daya manusia selain melalui penguasaan wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi, juga perlu pelatihan dan kursus keterampilan kepada petani dan nelayan. Dalam waktu bersamaan juga perlu tetap meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat.

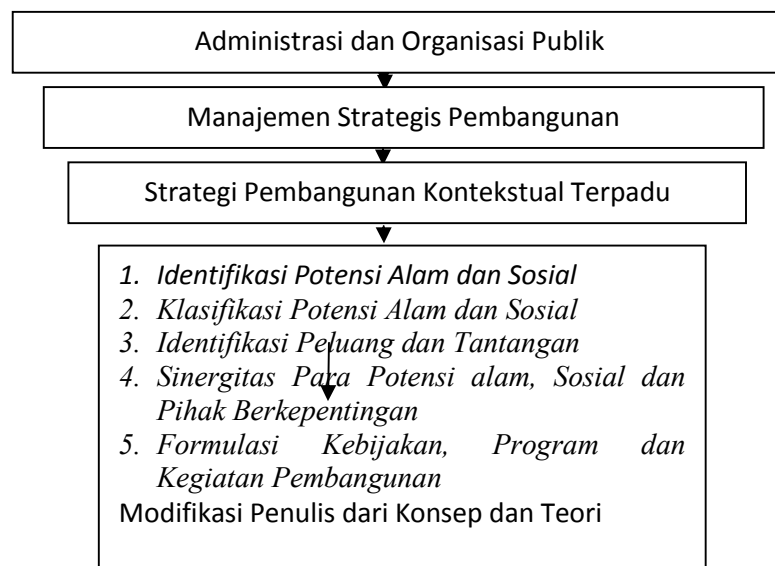
2.2. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan tentang keterkaitan antara konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan dalam menganalisis dan

memecahkan masalah, variabel beserta indikator-indikator variabel sebagai jawaban teoritis yang akan diuji secara empiris.

Kerangka pemikiran merupakan penjabaran hasil secara lisan maupun tulisan runtutan logika seseorang terkait atau hubungan atau pengaruh salah satu kondisi fenomena tertentu yang sedang dijadikan objek pengamatan dan pembuktian.

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Peneliti,, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau, selama 32 minggu.

4.2. Prosedur Pengumpulan Data

Data primer dan sekunder diperoleh melalui kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari seluruh instansi terkait, asosiasi dan kelompok masyarakat. Untuk memperoleh data yang akurat tentunya diperlukan pula teknik pengumpulan data yang tepat, cepat, efisien dan ekonomis, sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan makalah, jurnal, dokumen, dan laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berkaitan objek penelitian.

2. Studi Lapangan

Untuk mengumpulkan berbagai data, informasi dan keterangan yang diperlukan, maka digunakan studi lapangan sebagai berikut :

- a. Wawancara

Teknis penggalian data dan informasi secara lebih mendalam, dalam upaya pemahaman secara komprehensif tentang objek penelitian dengan cara wawancara , yang berisikan sejumlah pertanyaan pokok yang

telah dipersiapkan, dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pentabulasian data.

Wawancara langsung pada warga masyarakat untuk menjaring data kualitatif dalam penentuan pengembangan kawasan bersangkutan, Konsultan akan melakukan secara random pada berbagai tingkatan dan jenis masyarakat yang terdapat dalam desa bersangkutan. Demikian pula dalam pengamatan permasalahan yang terlihat nyata atau hasil prediksi, hasil ini akan dimatangkan secara berjenjang. Semua data yang didapat pada Rembug desa pertama akan diadakan kajian untuk menyimpulkan hasil kegiatan didalam format yang akan dibahas di Rembug desa tahap kedua. 5 Kegiatan di Pemerintah Kota Dalam Survey Instansional konsultan akan melakukan Cross Check terhadap kewajaran keinginan masyarakat dengan minta pendapat dari Instansi atau Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu. Data yang didapat akan dikonfirmasi secara *cross check*.

b. Observasi

Ada suatu konsep lama (namun masih banyak digunakan sebagai dasar pengembangan), yaitu : konsep Von Thunen mengenai wilayah pertanian, dimana secara umum dapat dijelaskan :

- Karakteristik wilayah umumnya terdapat pusat utama kegiatan dengan tipe permukiman perdesaan (kegiatan pertanian), dengan lokasi yang topografinya seragam/datar, serta iklim dan tanah yang juga seraga, dan

adanya jasa transportasi yang terbatas (pada masa itu transportasi dengan jenis kereta yang ditarik oleh hewan/ternak).

- Struktur yang dibentuk umumnya bertahap dan berjenjang dengan memanfaatkan kondisi lahan maupun tujuan pemanfaatannya, seperti :
 - Kawasan pusat dengan pemanfaatan kegiatan pertaniannya, sayuran, bunga potong, sapi perah, serta ayam petelur.
 - Lapis berikutnya adalah arahan penggunaan ruang hutan dan jenis kayu-kayuan.
 - Dan lapis-lapis berikutnya tanaman-tanaman produktif lainnya, serta yang terakhir pemanfaatan ruangnya adalah zona rimba sebagai barrier maupun tempat berburu (pada masa lalu).

Untuk melakukan identifikasi maupun analisis data secara kuantitatif, maka diperlukan data-data, seperti :

- Data Sekunder
 - Data kependudukan.
 - Jenis-jenis kegiatan industri pengolahan yang ada.
 - Kegiatan jasa yang ada.
 - Titik-titik simpul aksesibilitas di wilayah .
 - Data atau aktivitas ekonomi yang ada.
 - Kegiatan dan lapangan kerja utama penduduk.
 - Sebaran dan ketersediaan tenaga kerja.
 - PDRB sektor-sektor yang ada serta perubahannya.
 - Data-data penunjang lainnya.

- Data Primer.
 - Pemilikan penduduk atau petani terhadap tanah atau lahan produksi yang dimiliki.
 - Status umum petani di wilayah, penggarap, pemilik, atau pengusaha (penduduk luar yang berusaha di wilayah ini).
 - Jenis dan produksi utama kegiatan pertanian.
 - Kepemilikan alat angkut.
 - Kebutuhan sarana dan prasarana pertanian maupun pengolahan.
 - Sistem pemasaran hasil produksi yang ada.
 - Masalah-masalah yang dihadapi.
 - Data lainnya.

4.3. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

4.3.1. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan tabulasi angka-angka. Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki`

Berdasarkan pengertian pakar di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa metode survei deskriptif cocok untuk digunakan dalam penelitian ini, karena sesuai dengan maksud dari penelitian.

4.3.2. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan maksud untuk saling melengkapi, data diidentifikasi, di klasifikasi sesuai dengan sifat dan jenisnya, disajikan dalam tabel frekuensi, pembahasan dan diinterpretasi dan di bandingkan dengan penjelasan konsep teori sehingga akan memperlihatkan persamaan dan perbedaan antara penjelasan teori dengan kejadian fakta empirik.

4.4. Biaya Penelitian

Berikut biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian ini:

1. Honor			
Honor	Honor/Minggu (Rp)	Waktu (jam/Minggu)	Total Honor
Ketua	125.000	32 minggu	4.000.000
Anggota (1)	100.000	32 minggu	3.200.000
Anggota (2)	50.000	32 minggu	1.600.000
Sub Total			8.800.000
2. Peralatan Penunjang			
Material	Justifikasi Anggaran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)
Makan dan Minum	20.000	112 /hari	2.400.000
Sub Total			2.400.000
3. Bahan Habis Pakai			
Amplop Putih Panjang	17.000	4	68.000
Kertas HVS	35.000	5	175.000
Lem Kertas Glukol	12.000	4	48.000
Map Biola	2.000	20	40.000
Fotocopy Laporan	35.000	10	350.000
Fotocopy Biodata Responden	3.000	100	300.000
Kertas A4	50.000	5	250.000
Tinta Print	200.000	1	200.000
Jilid Laporan	100.000	5	500.000
Sub Total			1.931.000
4. Perjalanan			
Transportasi	200.000	1 minggu	1.400.000
<i>Penginapan dan Sewa Tempat pertemuan, Makan dan Minuman</i>	500.000	2 minggu	7.000.000
Sub Total			8.400.000
TOTAL KESELURUHAN			21.537.000

4.5. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama delapan bulan, mulai dari persiapan sampai dengan laporan penelitian. Lebih lanjut akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tahapan Penelitian	Tahun 2019			
	Februari	Maret-April	Mei-Juni	Juli – Sept
I. Persiapan				
a. Pembuatan Proposal Penelitian				
b. Revisi Proposal Penelitian				
c. Seminar Proposal Penelitian				
d. Revisi Proposal Penelitian				
e. Penyelesaian Administrasi Penelitian dan Perizinan				
II. Pelaksanaan				
a. Persiapan Penelitian				
b. Penelitian Lapangan				
c. Pengolahan Data				
d. Analisis Data				
III. Penyelesaian				
a. Pembuatan Laporan Penelitian				
b. Presentasi Hasil Penelitian				
c. Penyempurnaan Laporan Penelitian				
d. Pengumpulan Laporan Final				

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Strategi pembangunan kontekstual terpadu adalah sebagai proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan berkaitan dengan pilihan kebijakan program, kegiatan dan proyek pembangunan yang berdasarkan potensi alam dan sosial budaya usaha tani di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sebagai upaya sinergitas produksi, pengolahan pasca panen sampai memasarkan produk.

Dari uraian di atas jelas bagi kita bahwa dengan menggunakan model pembangunan kontekstual diharapkan dapat memudahkan bagi setiap orang untuk memahami fenomena dimana model itu diterapkan. Garna (1992) menyatakan dengan model dapat menjelaskan realitas pembangunan yang sesuai atau menurut konteksnya (kontekstual).

Pembangunan perdesaan secara nasional tidak mungkin dapat disamaratakan, mengingat perdesaan di Indonesia mempunyai ciri-ciri : umumnya kepadatan penduduk tidak terlalu tinggi, tingkat pendidikan rendah, keadaan alam dan geografis berbeda, kegiatan usaha utama adalah pertanian (termasuk kehutanan, peternakan, perikanan), tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah, masyarakat relatif homogen dalam hal mata pencaharian, agama dan adat istiadat.

Hasil penelitian Findley (Saefullah, 1995 : 13) menunjukkan pembangunan harus dilakukan dengan model pendekatan kontekstual yang sesuai dengan sifat dan cirinya, dan tidak dapat disamaratakan begitu saja antara model dan pendekatan pembangunan antara desa yang satu dengan yang lainnya.

Dalam rangka itu pembangunan suatu wilayah/daerah harus meliputi upaya-upaya besar yang satu sama lain saling berkaitan. Dengan melakukan pendekatan sistem (Winardi, 1999:149) semua upaya tersebut dijadikan masukan dalam proses pembangunan. Kemudian, proses pembangunan wilayah/daerah tetap pula melaksanakan manajemen pembangunan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan. Kesemuanya itu merupakan suatu proses dari fungsi manajemen yang sepenuhnya merupakan partisipasi masyarakat setempat tanpa campur tangan berlebihan dari pihak luar dan kekuasaan .

Sejalan pula dengan upaya pemberdayaan masyarakat maka pelaksanaan pembangunan di perdesaan disesuaikan pula dengan faktor historis desa, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, nilai sosial budaya dan nilai agamanya yang merupakan faktor-faktor lingkungan yang ikut berpengaruh (Friedmann, 1981:42; Bryant dan White, 1982:369; Findley, 1987 : 19; Saefullah, 1995 : 13).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas suatu model pembangunan yang kontekstual dengan pendekatan sistem dapat digambarkan pada lampiran 1.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir 11 605,97 (km²) dengan jumlah penduduk 703 734 jiwa (Tahun 2015), dengan sebutan negeri seribu parit terbagi

dalam 20 kecamatan dan 198 Desa dan 38 kelurahan (BPS Kabupaten INHIL, 2019).

Peluang Bisnis dan Investasi di Kabupaten Indragiri Hilir sangat terbuka lebar bagi para Bisnisan dan Investor baik dalam negeri maupun Manca Negara untuk berbagai sektor kegiatan. Yang di tunjang semakin meningkatnya sarana dan prasarana pendukung dan apa lagi telah bergulirnya otonomi daerah, maka daerah telah mempunyai kewenangan yang luas dalam hal penanaman modal/investasi dan secara umum peluang tersebut yang berkaitan dengan pengembangan sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan industri pengolahan sebagai berikut:

1. Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir. Berbagai komoditas tanaman perkebunan yang telah dikembangkan selama ini adalah kelapa lokal, kelapa hibrida, kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan pinang. Dari berbagai komoditas itu, kelapa lokal merupakan primadona.

Potensi hasil perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir yakni produksi kelapa Dalam mencapai 390.924,28 ton pertahun dengan luas lahan 302.370 Ha. Untuk kelapa hybrida tercatat produksi sebanyak 72.067 ton pertahun dari luas lahan 28.770 Ha. Sedangkan untuk produksi kelapa sawit sebanyak 567.802,56 ton pertahun dari lahan seluas 76.353,45 Ha. Untuk jenis komoditi karet dengan luas areal 4.861 Ha, kopi 1.338 Ha, sugu 17.656 Ha, kakao 2.170 Ha, pinang 15.413, nipah 17.435 Ha. dan aneka tanaman perkebunan lainnya 303

Ha (BPS, Kabupaten INHIL, 2019). Dengan potensi tersebut membuat Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai salah satu daerah kelapa terbesar di Dunia, bahkan dijuluki sebagai “Tanah Hampan Kelapa Dunia”. Potensi lahan untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah seluas 722.806 Ha. dan telah dimanfaatkan sekitar 600.691 Ha.

2. Perikanan dan Kelautan

Peluang investasi bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari penangkapan di perairan laut, budidaya air payau (tambak), budidaya laut (keramba jaring apung), budidaya air tawar (minatani) dan pengolahan tepung ikan.

Potensi perikanan tangkap di perairan laut sebesar 109,212 ton/th dengan tingkat pemanfaatan pada tahun 2008 sebesar 35.277,76 ton/th (32,30 %), dibidang budidaya perikanan daerah ini memiliki potensi lahan untuk pengembangan budidaya tambak seluas 31.600 ha dengan tingkat pemanfaatan 1.399 ha (4,42 %) dan budidaya air tawar (minatani) dengan potensi sebesar 1.657 ha baru dimanfaatkan sebesar 166 ha (10%). Sementara dibidang budidaya laut berupa pemeliharaan ikan didalam keramba jaring apung tersedia luas areal potensial yangdapat menampung sekitar 20.000 kantong keramba, dimana sampai saat ini belum termanfaatkan. Disamping itu terbuka peluang investasi dibidang industri pembuatan tepung ikan/udang, hal ini didukung dengan tersedianya bahan baku dari komoditi perikanan berupa ikan rucah yang cukup banyak yaitu sekitar 10.518,48 ton/th (BPS Kabupaten INHIL, 2019).

3. Pertanian dan Hortikultura

Sebagai daerah tropis, agraris dengan memiliki lahan yang cukup tersedia untuk pengembangan tanaman pangan dan buah-buahan berupa padi, sagu, plawija, manggis, duku, jeruk dan nenas dengan luas lahan basah (pasang surut) 23.965 ha dan lahan kering 84.864 ha. Pengembangan perkebunan masih tersedia lahan seluas 205.294 ha dengan berbagai komoditas, untuk pengembangan usaha perternakan ditawarkan adalah peternak besar dan unggas dengan di prioritaskan pada usaha ternak sapi potong, sedangkan untuk potensi pengembangan dan Investasi di bidang kelautan dan perikanan adalah usaha budidaya perikanan air payau (tambak) dengan luas kawasan 3.160 ha yang tersebar di 8 kecamatan dan ini telah dilakukan study identifikasi dan disain Kecamatan Kateman seluas 994,970 ha dan Kecamatan Kuala Indragiri seluas 951,65 ha, budi daya kerang darah (*Anadara granosa*) dengan yg tersebar pada 4 kecamatan (Kuindra, Reteh, Tanah Merah dan Mandah) dengan luas areal 2.490 ha dan budidaya kerambah jaring apung dapat dikembangkan sebanyak 20.000 unit (setiap 1 unit = 10 kantong) yang baru dimanfaatkan sebanyak 120 kantong, ini terdapat di Kecamatan Mandah, Kuindra dan Kateman (BPS Kabupaten INHIL, 2019)

4. Industri

Konsekuensi logis pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk pengembangan berbagai komoditas memberikan peluang untuk pengembangan industri

pengolahan /pembuatan pakan ternak dan ikan dengan potensi bahan baku yang cukup tersedia, industri pengolahan makanan dari ikan dan udang, industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan berupa pengolahan tepung beras dan ubi, industri pengolahan kecap serta makanan dari sagu dan buah-buahan, Industri pengolahan kelapa terpadu beserta turunannya seperti pengolahan minyak goreng, pengolahan sabut kelapa menjadi bahan jadi, pengolahan batang kelapa menjadi bahan perabot dan pengolahan tempurung menjadi karbo aktif, Industri pengolahan kelapa sawit, dari hasil kehutanan dapat dibuat moulding, Chipwood, Sawtimber untuk modal dan peralatan rumah tangga, pengolahan limbah kayu menjadi dowel, sumpit dan bahan pensil serta industri pembuatan alat-alat (suku cadang) maritim. Bidang lain yang bisa dikembangkan adalah industri pengolahan pakan ternak dan pakan ikan dengan bahan baku yang telah tersedia, misalnya kedelai dan jagung. Pada saat ini sedang dipersiapkan kawasan industri di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Kawasan Industri Kuala Enok yang letaknya sangat strategis berhadapan langsung dengan Selat Malaka, Laut Natuna dan Pelabuhan Samudera Kuala Enok. Kawasan ini memiliki prospek pengembangan yang sangat tinggi bagi industri pembekuan ikan dan udang, minyak ikan dan tepung udang, minyak jagung, bungkil kopra, pengolahan kelapa sawit, *margarine, stearin, oleic acid, fatie alcohol, pollyaxilated derivatives, fatty alcohol ester dan industri metallic salt*. Luas kawasan industri yang akan dikembangkan adalah 880 Ha (BPS Kabupaten INHIL, 2019)

Potensi sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang sangat strategis, Indragiri Hilir mengembangkan kawasannya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Riau. Pemanfaatan lahan sawah dan ladang di Indragiri Hilir masih sangat rendah yaitu sebagian besar masyarakat tani melakukan penanaman padi dalam satu tahun hanya sekali dengan menggunakan varietas padi yang berumur 5-6 bulan. Sisa waktu 6 bulan sawah yang dalam keadaan terlantar karena musim kemarau seharusnya dapat dioptimasi dengan penanaman tanaman palawija dan tanaman semusim lainnya. Riset ini akan menguji proposisi bagaimana masyarakat tani sebaiknya melakukan usaha-usaha kreatif dan inovatif dalam mengatasi permasalahan ini dengan melanjutkan usaha tani subsektor tanaman pangan, palawija dan hortikultura, selain padi sawah. Pemanfaatan sawah yang tidak hanya ditanam satu tahun sekali yang hanya terfokus pada padi sawah, selanjutnya diarahkan ke pola tanam rotasi tanaman ke tanaman pangan lainnya palawija dan lahan hortikultura. Demikian juga di sektor perkebunan, perikanan dan peternakan, belum ada keterpaduan semua sektor tidak terintegrasi ke dalam suatu pola yang terpadu. Setelah pasca panen petani diharapkan juga mampu melaksanakan usaha pasca panen dengan proses kemasan dan pengolahan produk lanjutan, misalnya pakan ternak dan pakan ikan, sehingga lebih ekonomis dan memiliki nilai tambah. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten INHIL yaitu 48,37 persen (Tahun 2018) pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Distribusi PDRB Kabupaten Indragiri Hilir menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dalam persen (Tahun 2010-2018)

Kategori	Distribusi PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48.93	50.78	49.88	49.41	49.31	48.37	48.09	48.02	44.77
B Pertambangan dan Penggalian	0.45	0.44	0.46	0.79	0.74	0.63	0.61	0.83	1.26
C Industri Pengolahan	26.37	24.56	25.06	25.41	24.52	24.82	24.48	23.66	24.11
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06
E Konstruksi	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
F Real Estat	4.64	4.84	5.03	5.24	5.11	5.35	5.34	5.57	6.11
G Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.47	13.35	13.21	12.74	14.08	14.39	15.12	15.50	16.90
H Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.96	0.95	1	1.04	1.04	1.09	1.08	1.08	1.14
I Transportasi dan Pergudangan	0.43	0.42	0.43	0.44	0.43	0.43	0.42	0.44	0.47
J Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.48	0.52	0.55	0.58	0.53	0.57	0.55	0.56	0.61
K Informasi dan Komunikasi	0.48	0.53	0.60	0.62	0.64	0.59	0.59	0.55	0.60
L Jasa Keuangan dan Asuransi	0.73	0.71	0.73	0.74	0.72	0.78	0.78	0.80	0.86
M,N Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	-	0.02
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.03	1.87	2.05	1.99	1.84	1.85	1.73	1.74	1.78
P Jasa Pendidikan	0.47	0.47	0.46	0.46	0.50	0.54	0.56	0.56	0.61
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.15
R,S,T,U Jasa lainnya	0.37	0.37	0.37	0.38	0.39	0.42	0.43	0.46	0.52
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Kabupaten INHIL, 2019

4.1.1. Beberapa Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Ada beberapa pemikiran pokok yang penting yang akan dibahas pada bagian berikut ini dapat dijadikan masukan untuk strategi pembangunan kontekstual terpadu di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, antara lain :

1. Perlu Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Di masyarakat desa selalu ada dua tokoh kepemimpinan, yaitu tokoh formal dan informal. Tokoh informal merupakan tokoh yang mempunyai kekuatan ikatan batin dengan warganya sehingga besar pengaruhnya pada masyarakat. Tokoh formal merupakan pemerintahan desa yang mempunyai kekuatan hukum.

Tokoh formal antara lain sbb :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala-kepala Dusun;
- d. Kepala-kepala Urusan;
- e. Anggota-anggota LMD;
- f. Para ketua dan seksi LKMD;
- g. Pengurus PKK;
- h. Semua RK dan RW;
- i. Semua petugas Instansi Terkait dalam pembangunan desa ;
 - Dephankam: Babinsa, Koramil, Bimpolda dari Polsek;
 - Dep. P dan K: Penilik SD, Penilik Olah Raga, Penilik Pendidikan di Puskesmas;

- Dep. Kesehatan: Dokter, juru rawat, sanitarian di Puskesmas;
- Dep. Pertanian: PPL, mantri kehewanan, polisi hutan, penyuluh penghijauan, mantri perikanan;
- Dep. PU: Petugas Pengairan (P3S);
- TSKT, Sarjana Penggerak Pembangunan Desa;
- Dep. Transmigrasi: Penerangan Transmigrasi;
- Sep. Sosial: TKSS, PSM, PSK;
- Dep. Penerangan: juru penerangan;
- Dep. Koperasi: Petugas penerangan KUD;
- Dep. Perindustrian dan Perdagangan: Petugas proyek BIPIK Perindustrian;
- BKKBAN: PLKB;
- BRI: Petugas BRI Unit Desa;
- Perguruan Tinggi: Mahasiswa KKN atau PKL.

Tokoh informal antara lain adalah sbb :

- a. Pemuka agama;
- b. Pemuka adat;
- c. Tokoh yayasan sosial dan pendidikan;
- d. Tokoh pemuda;
- e. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Pimpinan Orsospol Komisariat Desa;
- g. Kelompok tani dan nelayan;
- h. Kelompencapir;

i. Dan lain-lain sebagainya sebagai tokoh informal.

Kedua kelompok tokoh tersebut merupakan kekuatan yang sangat besar jika dapat dipersatukan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Namun sumber daya manusia tergolong tokoh informal dan informal ini harus ditingkat pengetahuannya, melalui pendidikan ataupun pelatihan. Karena mereka ini merupakan tokoh bagi masyarakat yang lainnya. Dan merekalah nantinya menjadi sasaran pembinaan utama dalam berbagai bidang pembangunan, khususnya pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dll, selain dari mereka juga tetap melakukan tugas dan fungsinya masing-masing.

Di harapkan apabila tokoh masyarakat ini berhasil maka masyarakat yang lain akan dapat dan mudah mencontohnya, karena secara batin masyarakat lain mempunyai kepercayaan sikap dan perilaku kepada tokoh masyarakat yang demikian.

Pada masa sekarang ini mayoritas desa-desa di Indonesia sumber daya manusia tokoh masyarakatnya masih rendah, sehingga belum mampu mejadi pelopor (agen pembangunan) yang handal. Mereka ini harus ditingkatkan kemampuannya melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan sehingga mempunyai pengetahuan dan teknologi yang dapat menggerakkan dan menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya, misalnya dalam pertanian, dll.

Selain dari itu sebagai upaya awal adalah sewaktu pemilihan dan penempatan tokoh-tokoh formal di perdesaan, betul-betul harus membuat persyaratan yang kolektif dan memberikan jaminan gaji yang memadai, sehingga mereka dapat

termotivasi untuk tinggal di perdesaan. Misalnya untuk persyaratan pendidikan formal seorang kepala desa dan pendamping desa minimal tamat sarjana muda STPDN atau sederajat. Seorang sarjana ini, sebaiknya yang berasal dari masyarakat setempat, apakah melalui tugas belajar atau mereka yang belajar sendiri kemudian dikembalikan ke desanya. Diharapkan apabila tokoh-tokoh masyarakat yang demikian sebagai agen perubahan, atau agen pembangunan diharapkan mampu memimpin desanya. Dengan dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai diharapkan dapat mengelola (manajemen) seluruh potensi masyarakat yang ada.

Dan untuk pemerintah, perlu diingatkan bahwa sumber daya manusia Indonesia mempunyai kaitan dengan sampai sejauh mana mutu pendidikan formal dan informal yang ada. Secara tidak langsung kalau berbicara mutu pendidikan formal baik negeri atau swasta memang belum memadai (khusus di Riau). Dan ini secara langsung atau tidak langsung akan mempunyai hubungan kepada SDM masyarakat perdesaan kita.

Penulis berpendapat jika ingin sukses pembangunan di tempat kita, maka Pemerintah Daerah selain Pemerintah Pusat perlu memikirkan dan membantu terutama lembaga-lembaga perguruan tinggi swasta yang memang penyelenggaraannya murni swadaya masyarakat. Karena swadaya masyarakat, misalnya Universitas Islam Riau, tidak sedikit masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai kuliah ditampung juga di UIR, dengan dasar karena UIR sebagai lembaga sosial dan tetap memegang prinsip semua Warga Negara

Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak sampai ke jenjang pendidikan yang tertinggi.

Dalam masalah ini, UIR memang secara bertahap walaupun dengan kemampuan keuangan yang sangat terbatas, tetap komitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia tenaga pengajar (dosen). Dan UIR menyadari betul bahwa faktor yang utama dalam meningkatkan kualitas mahasiswa (SDM), tidak lain adalah tingginya kualitas tenaga pengajar (dosen).

Di sinilah, perlunya peranan Pemerintah Daerah turut ambil bagian atau mau membantu secara bersama-sama untuk meningkatkan SDM tenaga pengajar dengan menyekolahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi (S2 dan S3) secara bertahap. Kemudian dengan kualitas dosen yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan SDM mahasiswa atau tamatan di Perguruan Tinggi, yang kemudian secara tidak langsung mereka ini berkualitas, diharapkan dapat memberikan sumbangan tenaga, pemikiran bagi pembangunan terutama di perdesaan, bahkan mereka ini diarahkan untuk kembali ke desa untuk membangun desa.

1. Memfungsikan Semua Lembaga Pemerintah dan Kemasyarakatan

Sebagaimana yang telah penulis utarakan pada bagian terdahulu tulisan ini, bahwa semua lembaga yang ada di perdesaan belum berfungsi secara maksimal, baik lembaga instansi terkait maupun lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, khususnya pada kegiatan pembangunan pertanian dan perekonomian masyarakat. Konkritnya semua tokoh formal dan

informal yang ada di masyarakat perdesaan harus mau dan mampu mengelola lahan pertanian, perkebunan, perikanan (dalam batas ukuran tanah tertentu, misalnya untuk pertanian 100 x 100 M), industri kecil, kerajinan (dalam skala tertentu) dll.

Apabila ini berhasil maka diharapkan masyarakat lainnya akan mencontoh dan mengikutinya. Untuk menunjang keberhasilan ini perlu didukung oleh lembaga yang mengelola permodalan dan penyediaan bibit, racun pemberantas hama, peralatan pertanian, kebutuhan makanan sehari-hari para petani, sebagai tempat penampungan hasil-hasil pertanian, dll. Lembaga perekonomian ini untuk Negara kita yang menganut sistem ekonomi Pancasila, tidak lain adalah lembaga Koperasi Unit Desa (KUD) dan BUMDES.

Selama ini KUD dan BUMDES sebagai nadi perekonomian perdesaan belum berjalan dengan baik. Persoalan yang sering terjadi adalah dalam hal menejemennya. Terkadang di tubuh KUD sering terjadi adanya konflik kepentingan pengurus secara pribadi dengan masyarakat. Karena KUD diharapkan sebagai pusat kegiatan perekonomian perdesaan, lembaga ini memang perlu dibenahi dari segi pengelolaan maupun permodalannya. Saya punya pemikiran, bahwa yang mengelola KUD sebaiknya komposisi pengurus antara pihak BRI unit desa dan sebagian anggota masyarakat yang dipilih. Dan pihak pengambilan keputusan harus dari pihak BRI.

Memang pemerintah khususnya BRI atau Bank BUMN dan BUMD lainnya harus membuat program tersendiri dalam hal ini. mereka yang telah

ditempatkan BRI selain mempunyai gaji tetap dari BRI juga mendapat gaji sebagai hasil keuntungan bersama dari KUD. Di harapkan sebagai pemegang tampuk pengambilan keputusan adalah orang-orang yang ditempatkan BRI ini yang kualitas SDM nya diharuskan orang-orang yang terpilih dan mempunyai kemampuan manajemen dan semangat pengabdian yang tinggi. KUD seperti inilah yang diharapkan mampu memberikan modal kepada petani, sebagai tempat petani membeli atau mengutang membeli peralatan pertanian, bibit, kebutuhan makanan sehari-hari, dan tempat menampung hasil-hasil pertanian. Selain KUD ini berfungsi sebagai simpan pinjam, KUD yang begini diharapkan dapat mendistribusikan atau menjual hasil-hasil pertanian untuk dikirim ke pasar lokal, nasional dan bahkan Internasional.

2. Membimbing dan Mengarahkan Berusaha yang Efesien dan Inovatif

Dalam hal ini tokoh formal dan informal di perdesaan setelah dibina oleh pemerintah yang punya tugas khusus untuk itu juga dapat dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu baik melalui program KKN, dosen-dosen melalui pengabdian masyarakat desa mitra binaan, juga oleh masyarakat lainnya yang mau menyumbangkan tenaga, pemikiran bagi pembangunan masyarakat di perdesaan (sarjana yang baru selesai kemudian kembali ke kampung tempat asalnya).

Setelah mereka ini diberikan bimbingan dan pelatihan secara intensif di perdesaan dalam hal bagaimana cara-cara berkebun, bertani dengan menerapkan pengetahuan dan teknologi, sehingga mendapat hasil atau

produksi yang efisien dan berlipat ganda. Misalnya termasuk juga dalam hal bagaimana memilih tanaman yang tepat yang sesuai dengan keadaan lahan tanah dan kondisi permintaan pasar. Perlu diingat, bahwa salah satu sikap dan perilaku masyarakat perdesaan adalah pola untuk selalu mengikuti dan mencontoh pola petani dari orang lain yang sudah pernah dan berhasil.

Momentum ini harus dapat dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh masyarakat di perdesaan yang harus terlebih dahulu melaksanakan gerakan berkebun, bertani dll. Apabila tokoh masyarakat ini berhasil maka yang lain akan mengikut. Jadi sasaran pembinaan utama dari pemerintah atau lembaga kelompok masyarakat lain yang ingin membangun desa pekerjaan yang utama adalah bagaimana cara kita membangkitkan semangat dan kamauan tokoh formal dan informal ini untuk terlebih dahulu berbuat dan mau berbuat, kemudian baru diikuti masyarakat yang lainnya dalam rangka meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian di perdesaan. Masalahnya memang cara-cara yang seperti ini relatif belum terlaksana dengan baik. contohnya: sarjana pertanian yang tamat disuatu perguruan tinggi cenderung untuk tetap tinggal di kota dan tidak mau kembali ke desa.

Jadi ada kesan kalau sudah sarjana untuk apa kembali lagi ke desa. Sesungguhnya menurut penulis sarjana yang baru tamat ini di kotapun keluyuran dan bahkan sulit memperoleh pekerjaan. Sesungguhnya di desanya (kampungnya) banyak lapangan kerja yang harus digarap yang juga bisa memberikan jaminan penghasilan yang berlipat ganda jika

dibandingkan menjadi seorang pegawai negeri (dengan catatan menjadi petani sukses).

3. Membangun Infrastruktur dan Memberikan Kemudahan Bagi Para Investor Nasional dan Internasional

Dalam masalah ini memang perlu kerjasama dari berbagai instansi yang terkait dalam rangka membangun masyarakat perdesaan. Banyak contoh-contoh yang dapat kita rasakan. Misalnya Pemerintah Daerah, Bappeda, BKPM, PMA, Badan Pertanahan Nasional, Perizinan, dll instansi terkait bekerjasama, untuk mendorong investasi perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dari berbagai perusahaan swasta nasional ataupun internasional untuk mengolah sumber daya alam yang sebagian besar masih belum terjamah di perdesaan. Tentunya infrastruktur harus di bangun terlebih dahulu, fasilitas jalan, listrik, dll.

Ini tentunya berkat masukan investor yang saya kira mengembangkan Pola Perkebunan Inti Rakyat, misalnya RAPP dengan HTI nya atau PT. Pulau Sambu dengan Plasmanya. Hanya saja pihak swasta ini sistemnya harus baik dan adil, jangan sampai penduduk masyarakat setempat ada yang tidak ditakutkan, artinya masyarakat setempat harus merasakan dampak positif masuknya investor kesana.

Pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan sarana jalan, listrik melalui Bappeda harus pula membantu mengalokasikan pembangunan sarana dan prasarana ke daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit terjangkau, baik sumbernya dari APBN ataupun APBD.

4. Mengarahkan Masyarakat Melakukan Kegiatan Pertanian Sesuai Kondisi Lahan dan Kondisi Permintaan Pasar

Tidak jarang masyarakat perdesaan kurang memahami bagaimana bertani yang produktif dan efisien. Ini harus diakui karena kita menyadari masyarakat perdesaan kurang pengetahuan dan teknologi pertaniannya. Melalui pembinaan kepada masyarakat formal dan informal dan akhirnya akan diikuti masyarakat lainnya di desa, melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, dll yang harus selalu produktif dan efisien harus selalu diterapkan. Misalnya pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan, misalnya: tanah yang berawa tidak mungkin cocok untuk tanaman untuk daerah dataran tinggi. Termasuk disini iklim dan curah hujannya. Konsekuensinya supaya menghindari pemborosan tenaga, biaya dalam mengolah pertanian. Logikanya tanaman akan subur dan berkembang dengan baik jika ditanam ditempat yang disukainya. Dan selain dari itu juga diprioritaskan tanaman yang ditanam atau usaha yang dilakukan dalam kegiatan pertanian mengacu kepada permintaan pasar. Artinya jika suatu hasil pertanian yang sudah selalu tersedia di pasar dan berlebih-lebihan janganlah memilih atau memprioritaskan hasil pertanian yang sudah selalu tersedia di pasar dan berlebih-lebihan janganlah memilih atau memprioritaskan hasil pertanian seperti ini. Karena akan mengakibatkan menurunnya harga penjualan, karena menurut hukum pasar, apabila barang selalu tersedia sementara permintaan berkurang maka harga akan turun (atau

sebaliknya). Jika harga produksi pertanian turun maka niscaya akan mempengaruhi tingkat pendapatan pertanian.

Selain itu juga para petani harus diarahkan menanam tanaman yang tumbal sulam, artinya ada kombinasi antara tanaman keras (perkebunan) dan tanaman palawija, pangan, tanaman hortikultura atau tanaman sebagian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan petani sehari-hari, misalnya jagung, ubi, kacang-kacangan, buah-buahan, kunyit, halia, lengkuas, tomat, cabe, dll sebagainya. Selain itu juga peternakan: ayam, itik, kambing, dll sebagainya.

4.1.2. Beberapa Faktor Penting Berkaitan Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Ada beberapa faktor penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan inovasi pada petani kita, antara lain:

Pertama, faktor sumber daya manusia. Sebagaimana telah diketahui ada dua kelompok pelaku dalam pembangunan yaitu Pemerintah dan masyarakat. Kedua pelaku pembangunan ini adalah sama-sama penting dan memberikan akses bagi pembangunan. Kedua pelaku pembangunan ini sama-sama perlu ditingkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Walaupun dipihak Pemerintah telah cukup memadai kemampuan daya pikir dan nalarnya dalam berkreativitas, namun dipihak masyarakat dirasakan masih banyak kelemahan, jika dilihat dari sisi sumber daya manusianya. Oleh karena itu dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah Provinsi Riau, perlu diberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani dan nelayan, dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam berusaha. Selain itu

instansi yang terkait menyangkut masalah kegiatan pertanian harus pula rutin dan lebih serius lagi dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan.

Kedua, faktor lahan pertanian. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah Provinsi Riau, faktor pemilikan lahan oleh petani sangat penting, dan justru perlu pengaturan, pembagian, dan penataan kembali kepemilikan hak-hak atas tanah. Selain perusahaan-perusahaan besar Pemerintah (BUMN) dan swasta yang menguasai lahan untuk perkebunan dengan areal yang begitu luas, meskipun hanya dengan hak guna usaha atau hak pakai dan sebahagian lagi penduduk kota yang begitu banyak menguasai lahan yang tidak produktif maksudnya tidak diusahakan, melainkan hanya untuk memperoleh keuntungan dari hasil jual-beli sebagai pakang tanah. Sementara pada sisi yang lain petani kita yang ingin melakukan kegiatan usaha pertanian tidak mempunyai cukup lahan, sebagai akibat tidak mampu untuk membelinya atau tidak memiliki modal untuk membuka lahan baru. Dimasa yang akan datang, Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui Dinas Pertanahan harus benar-benar melakukan pemetaan, pembagian dan penggunaan lahan pertanian secara transparan dan seadil-adilnya, sehingga lahan-lahan yang tidak produktif dapat diserahkan kepada masyarakat yang tidak memiliki atau lahannya sangat sempit untuk kegiatan berusaha.

Ketiga, faktor permodalan. Selain masalah lahan pertanian, petani di daerah Provinsi Riau, perlu pula memiliki modal dalam arti dana untuk investasi dan modal kerja. Jika tidak ada dana, sudah barang tentu petani tidak akan mungkin memiliki peralatan, bibit tanaman yang unggul, pupuk, racun hama dan biaya hidup selama kegiatan produksi. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Riau

harus membuat program bantuan permodalan sebagai upaya mengatasi kesulitan permodalan petani dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan. Program permodalan petani untuk kegiatan berusaha, dapat dilakukan Pemerintah melalui kebijakan kredit lunak melalui bank milik Pemerintah Daerah, misalnya melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) dan PT.PER atau program bantuan khusus disalurkan kepada KUD atau Bank Desa yang telah dibentuk dan dibina secara mapan.

Keempat, faktor teknologi. Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dan membutuhkan banyak modal, pengetahuan khusus dan teknologi tepat guna. Dengan penggunaan teknologi, misalnya : bibit unggul, pupuk, racun hama, dan peralatan mekanik, kegiatan pertanian diharapkan lebih efisien dan produktif. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan, petani secara menyeluruh harus dapat menikmati penggunaan bibit unggul, pupuk, racun hama, dan peralatan mekanik yang mudah didapat dan dengan harga yang relatif terjangkau oleh petani. Semua teknologi tersebut seharusnya tetap selalu tersedia, namun dalam kenyataannya di daerah Provinsi Riau teknologi tersebut sangat sulit didapat dan harganya pun relatif cukup tinggi, terutama peralatan mekanik untuk kegiatan pengolahan lahan dan untuk kegiatan pasca panen. Karena itu kebijakan pengembangan dan penemuan baru di bidang teknologi pertanian harus tetap selalu ditingkatkan, dalam rangka produktivitas, efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha tani. Upaya tersebut dapat dilakukan apabila Pemerintah Daerah Provinsi Riau mau bekerjasama dengan lembaga riset

dan teknologi melalui berbagai perguruan tinggi yang ada di Daerah, misalnya dengan Fakultas Teknik dan Fakultas pertanian UNRI, UIR atau UNILAK.

Kelima, faktor distribusi dan pemasaran. Setelah kegiatan produksi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan distribusi dan pemasaran hasil produksi harus ditata sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa setiap hasil pertanian tetap terjual di pasaran lokal, regional dan internasional. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus menciptakan pengaturan dalam rangka memasarkan produk pertanian di daerah. Pemasaran lokal diserahkan kepada Koperasi Unit Desa dan pemasaran regional dan internasional harus ada koordinasi antara instansi terkait, misalnya: Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Badan Gugus Kendali Mutu, termasuk pula Badan yang mengatur kegiatan Ekspor-Inpor.

Keenam, pemberdayaan koperasi. Perubahan mendasar pada fungsi koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan adalah dengan telah dikeluarkannya UU. No. 25 Tahun 1992, bahwa koperasi tidak lagi semata-mata sebagai organisasi ekonomi bertujuan sosial melainkan sebagai organisasi ekonomi yang mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang dimaksud, struktur koperasi termasuk KUD di Provinsi Riau yang selama ini kurang efektif perlu dilakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Tidak saja perluasan usaha, manajemen yang baik, struktur modal yang kuat sampai kepada peningkatan sumber daya manusia pengurus dan keanggotaannya. Dengan demikian, strategi pemberdayaan

koperasi, seharusnya diarahkan kepada : *Pertama*, posisi, peran dan fungsi Pemerintah Daerah haruslah mendorong peran serta, efisiensi, dan produktivitas masyarakat melalui koperasi; *Kedua*, meningkatkan kegairahan, kesadaran, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat; *Ketiga*, meningkatkan kemitraan usaha diantara sesama lembaga koperasi, dan antara koperasi dengan usaha swasta dan BUMN lainnya; dan *Keempat*, menciptakan iklim berusaha yang mendukung tumbuhnya koperasi secara sehat dan mandiri.

Ketujuh, kemitraan berusaha. Dalam perkembangan perekonomian masyarakat daerah di Provinsi Riau, sangat dirasakan adanya kepincangan struktural, antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah. Kesenjangan itu merupakan akibat dari tidak meratanya pemilikan sumber daya produksi dan produktivitas usaha, serta sistem distribusi dan pemasaran diantara pelaku ekonomi. Untuk memecahkan masalah ini menuntut perlu dilakukannya kemitraan berusaha, dan bukan ketergantungan dan persaingan yang tidak sehat. Kemitraan berusaha yang dimaksud adalah dalam rangka penciptaan hubungan kerja antara pelaku ekonomi yang didasarkan kepada ikatan yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sejajar, dilandasi oleh prinsip saling menunjang, dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Pengalaman telah membuktikan bahwa dalam berusaha masing-masing pihak tetap saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, atas dasar kelebihan dan kelemahan ini setiap usaha dituntut untuk selalu berkerjasama dan bermitra. Justru disinilah arti penting ekonomi kerakyatan. Usaha yang besar dan usaha kecil saling membutuhkan dan saling berkerjasama dalam rangka mencapai produktivitas dan

efisiensi dalam persaingan yang sehat. Dalam sistem perekonomian yang kita anut sebenarnya tidak ada persaingan bebas yang tidak seimbang, yang ada hanyalah persaingan sehat berupa perlombaan untuk mencari yang terbaik dan bermanfaat bagi semua pihak. Usaha yang satu harus dapat menunjang usaha yang lain, dan tentunya merupakan bahagian dari yang lain. Perusahaan yang besar menopang dan mendorong yang kecil agar tumbuh besar, dan yang kecil membantu yang besar dalam penyediaan berbagai kebutuhan bahan mentah dan lain sebagainya. Pada akhirnya menciptakan suatu totalitas sistem usaha bersama untuk kesejahteraan bersama. Pengalaman telah membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada perusahaan yang maju dan menjadi besar sendiri meninggalkan usaha-usaha lain yang kecil. Semua berhubungan, terkait dan interdependensi. Model kemitraan berusaha yang dimaksud dapat berupa hubungan yang saling menguntungkan (*komensalismo*), misalnya petani perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau menyediakan bahan mentah, sedangkan pabrik selain menyediakan kebutuhan petani sekaligus mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau menghasilkan minyak goreng untuk dipasarkan pada pasar lokal, regional dan internasional. Bentuk hubungan kerjasama ini dapat saja diterapkan pada hubungan antara petani dengan KUD yang memiliki pabrik pengolahan barang-barang produksi. Dengan demikian, kemitraan usaha ini diharapkan pula dapat memberantas atau mengurangi kegiatan monopoli dan oligopoli dari sekelompok orang yang perekonomiannya yang sudah sangat kuat dalam masyarakat. Selanjutnya dalam kemitraan usaha, selain saling menguntungkan, juga harus adil dan dinamis. Adil, dalam arti kemitraannya tidak memberatkan kepada salah satu

pihak. Dinamis, dalam arti tidak terpaku pada suatu keadaan, tetapi senantiasa disesuaikan dengan tuntutan keadaan situasi dan kondisi setempat, sehingga efektivitas, produktivitas, dan kualitas usaha kemitraan senantiasa tetap terjaga. Sampai saat ini, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan ternyata konsep kemitraan berusaha di Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik, karena itu diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat proses sosialisasi kemitraan berusaha. Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam hal ini adalah membuat kebijakan, memfasilitasi pertemuan dan dialog antara perusahaan-perusahaan besar Pemerintah (BUMN) dan swasta dengan petani sebagai pemilik lahan, tentang kemitraan berusaha.

Kedelapan, Persaingan Usaha Sehat. Dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, tidak dibenarkan adanya praktek-praktek monopoli, oligopoli dan kartel. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi dan keadilan. Kegiatan monopoli sudah barang tentu tidak efisien, karena pelakunya secara sengaja membatasi keluaran dan membebankan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika keluaran atau produksi itu dihasilkan dalam kondisi persaingan yang murni dan sempurna. Oleh sebab itu dapat ditegaskan disini bahwa monopoli atau sejenisnya seperti perusahaan-perusahaan BUMN adalah tidak efisien jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta yang murni bersaing, karena BUMN menghasilkan terlalu sedikit dengan beban biaya yang tinggi. Berkurangnya persaingan atau kompetisi yang didukung oleh adanya subsidi Pemerintah, telah menyebabkan perusahaan-perusahaan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dituduh sebagai perusahaan yang dijalankan dengan

manajemen yang kurang baik, tidak efisien dan dicemari oleh akses-akses birokrasi, korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela. Oleh karena itu usaha apaun, besar atau kecil termasuk perusahaan-perusahaan negara atau perusahaan Daerah yang kegiatannya berbau monopoli, harus diswastakan (privatisasi) murni dan dipaksa untuk dapat bersaing di pasaran yang bebas. Demikian pula halnya dengan kegiatan kartel, tidak dibenarkan ada dan berkembang dalam sistem perekonomian kerakyatan. Kegiatan kartel hanya menciptakan kelompok-kelompok usaha yang kecenderungannya dikuasai oleh sekelompok masyarakat saja, sedangkan sebahagian besar masyarakat yang lainnya tidak mendapatkan akses dan kesempatan untuk berusaha. Untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek monopoli, oligopoli dan kartel ini, Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus lebih serius melaksanakan undang-undang tentang pelarangan kegiatan monopoli, oligopoli dan kartel dalam setiap dunia usaha.

4.1.3. Pola Kemitraan, Investasi dan Bagi Hasil

Tanah milik masyarakat tidak dibeli tetapi hanya disewa selama 30 Tahun. Kerjasama yang saling menguntungkan diantara pihak perusahaan sebagai pengelola pihak manajemen dengan petani pemilik lahan tidur / non produktif dan masyarakat pemilik modal dengan komposisi keuntungan hasil bersih perbulan sbb:

- a. Pihak Perusahaan Pengelola : $40 \% \times 1 \text{ Jt Ha} \times 20 \text{ Th} = \text{Rp. } 96 \text{ T}$, (Pembagian deviden 70 % untuk pemilik, 20 % untuk karyawan, 5 % untuk pengelola Komisariss dan Direksi, 5 % untuk Program CSR dan Kemitraan). Pihak Petani Pemilik Lahan : $20 \% \times 1 \text{ Jt Ha} \times 20 \text{ Th} = \text{Rp. } 48 \text{ T}$, Ditargetkan setiap KK

memiliki 4 Ha dengan penghasilan bersih $20\% \times 1,5 \text{ Jt} \times 4 \text{ Ha} = \text{Rp. } 1.2 \text{ Jt} +$ sebagai buruh tani $1 \text{ Jt} = \text{Rp. } 2.2 \text{ Jt} / \text{KK} / \text{bulan}$ selama 20 Th. Pada Tahun ke 6 Perusahaan melaksanakan program pembuatan rumah layak huni untuk petani dengan Tipe 45 permanen dilengkapi dengan sarana listrik dan air bersih, cara pembayaran dipotong dari hasil selama 20 Th.

- b. Pihak Masyarakat Pembeli Hak Usaha : $40\% \times 1 \text{ Jt Ha} \times 20 \text{ Th} = 96 \text{ T}$, Penghasilan setiap Ha adalah $40\% \times 1,5 \text{ Jt} \times 1 \text{ Ha} = \text{Rp. } 600.000 / \text{bulan}$ selama 20 Th. Dari penghasilan tersebut diwajibkan untuk menabung sebesar $15\% \times \text{Rp. } 600.000 / \text{bulan} = \text{Rp. } 90.000,-$ dana ini digunakan untuk investasi penanaman kembali periode ke II untuk 25 Th kemudian. Jika pembeli meninggal dunia maka haknya jatuh ke ahli waris dan apabila terjadi tunggakan selama 3 bulan berturut-turut maka akan dialihkan kepada pembeli lain dan angsuran yang sudah dibayar dikembalikan dengan potongan uang administrasi sebesar 15 %.
- c. Sumber Pembiayaan , modal awal yang disediakan perusahaan Rp. 20 M, dengan modal yang disetorkan beserta Asset berjumlah Rp. 5 M (25%). Tanah (Lahan tidur / non produktif yang diserahkan masyarakat dengan jangka waktu 30 Tahun. Yang di prediksi target 1 Jt Ha diperuntukkan 500.000 KK Petani dengan kompensasi 20 % hasil bersih / Ha selama 20 Tahun. Hasil penjualan potensi kayu yang diperkirakan $500.000 \text{ Ha} \times 1 \text{ Jt Rp. } 500 \text{ M}$, dan penjualan batang kelapa $250.000 \text{ Ha} \times 200 \text{ batang} = 50.000 \text{ batang} = 25.000 \text{ kubik} \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 12,5 \text{ M} + 500 \text{ M} = \text{Rp. } 512 \text{ M}$. Pihak masyarakat pembeli Hak usaha antara lain : Pegawai Pemerintah, Pegawai BUMN, BUMD, Guru,

Bidan, Dosen, POLRI, TNI, Pegawai Perusahaan, Karyawan Bank, Pedagang, Dll. Selama 5 Tahun, masa tanam membayar uang administrasi Rp. 500.000, dan uang angsuran Rp. 300.000/bulan = Rp 18 Jt/Ha x 1 Jt Ha = Rp. 18 Trilyun.

4.2. Industrialisasi Pengolahan Pakan Ternak dan Pakan Ikan

Menurut Endar (2005), Persyaratan sosial ekonomis yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan baku untuk pembuatan pakan buatan adalah : mudah diperoleh, mudah diolah, harganya relatif murah, bukan merupakan makanan pokok manusia, sedapat mungkin memanfaatkan limbah industri pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Jenis-jenis bahan baku yang digunakan dalam membuat pakan buatan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu bahan baku hewani, bahan baku nabati dan bahan baku limbah industri pertanian. Bahan baku hewani adalah bahan baku yang berasal dari hewan atau bagian-bagian tubuh hewan. Bahan baku hewan ini merupakan sumber protein yang relatif lebih mudah dicerna dan kandungan asam aminonya lebih lengkap dibandingkan dengan bahan baku nabati. Beberapa macam bahan baku hewani yang biasa digunakan dalam pembuatan pakan ikan antara lain adalah : tepung ikan, Silase ikan, tepung udang, tepung cumi-cumi, tepung cacing tanah, tepung benawa/kepiting, tepung siput laut, tepung bakicot, tepung darah, tepung tulang, tepung hati, dan tepung artemia (Gusrina, 2008). Demikian juga dengan kotoran sapi dan manusia. Hasil penelitian Zulhelmi,dkk (2016) menunjukkan perlakuan pakan limbah

asal feses sapi berpengaruh sangat nyata ($P < 0.01$), terhadap berat badan, pertambahan berat badan, dan konsumsi ransum ikan Lele Dumbo.

Bahan baku nabati adalah bahan baku yang berasal dari tumbuhan atau bagian dari tumbuh-tumbuhan. Bahan nabati pada umumnya merupakan sumber karbohidrat, namun banyak juga yang kaya akan protein dan vitamin. Beberapa macam bahan baku nabati yang biasa digunakan dalam pembuatan pakan ikan antara lain terdiri dari : tepung kedelai, tepung jagung, tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, tepung daun lamtoro, tepung daun singkong, tepung kacang tanah, dan tepung beras (Endar, 2005).

Bahan baku limbah industri pertanian adalah bahan baku yang berasal dari limbah pertanian baik hewani maupun nabati. Beberapa macam bahan limbah yang sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakan ikan antara lain terdiri dari: dedak halus, kotoran kerbau/sapi, kulit kakao, tepung kepala udang, tepung anak ayam, tepung darah, tepung tulang, ampas tahu, bungkil kelapa, dedak halus, dan isi perut hewan mamalia (Gusrina, 2008).

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi bahan baku untuk industri pengolahan pakan ternak dan pakan ikan, antara lain bungkil dan ampas kelapa dalam dan kelapa hiberida, dedak padi, tepung jagung, tepung sagu, tepung kacang kedelaibungkil kelapa sawit, tepung ubi atau topoika, tepung ikan, siput laut, bakicot, cacing, tepung tulang sapi, ktulang kambing, tulang ayam dari limbah rumah makan, limbah sayur-sayuran, tumbuhan paku air (*azolla microphylla*) dan enceng gondok (*kiambang*),

temu lawak, limbah asal feces sapi dan manusia. Tabel.4.2. Produksi, Rata-rata Produksi per Ha Kelapa Dalam di Kabupaten Indragiri Hilir , 2015, sebagai berikut.

Kecamatan	Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (Kg/Ha)	Jumlah Petani
(1)	(2)	(3)	(4)
Keritang	24 561 856	1 004	4 988
Kemuning	16 996	1 214	2 892
Reteh	18 106 647	1 391	9 133
Sungai Batang	8 169 530	1 345	3 149
Enok	30 940 980	966	5 909
Tanah Merah	18 434 702	1 499	7 702
Kuala Indragiri	12 720 386	986	1 245
Concong	9 856 275	1 268	5 502
Tembilahan	9 606 660	1 335	2 220
Tembilahan Hulu	3 581 655	1 155	5 111
Tempuling	7 417 200	1 200	719
Kempas	5 540 682	1 218	2 073
Batang Tuaka	17 439 786	1 014	23
Gaung Anak Serka	7 811 256	744	11 384
Gaung	18 556 908	913	3 210
Mandah	45 439 200	1 200	2 873
Kateman	29 126 972	1 211	4 272
Pelangiran	16 399 584	1 539	744
Teluk Belengkong	5 099 824	1 516	1 866
Pulau Burung	9 771 600	1 200	5 249
Jumlah/Total	298 598 699	1 196	80 264

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, 2019

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 298.598.699 kg produksi kelapa dalam bulat atau setara dengan 298.599 ton

per tahun. Limbah dari industri pabrik kelapa dalam berupa bungkil kelapa dari paberik kelapa dan ampas kelapa dari limbah rumah makan dan rumah tangga diperkirakan berpotensi 5 persen dari produksi kelapa dalam 298.599 ton per tahun, maka didapat bahan baku berupa bungkil kelapa dari pabrik kelapa dan ampas kelapa dari limbah rumah makan dan rumah tangga sejumlah 14.953 ton per tahun.

Tabel 4.3. Produksi, Rata-rata Produksi per Ha Kelapa Hybrida di Kabupaten Indragiri Hilir, 2015

Kecamatan	Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (Kg/Ha)	Jumlah Petani
(1)	(2)	(3)	(4)
Keritang	273 470	943	153
Kemuning	840	840	-
ReteH	104 000	1 600	52
Sungai Batang	23 250	1 550	8
Enok	224 092	926	199
Tanah Merah	796 950	1 050	327
Kuala Indragiri	516 460	1 519	419
Concong	-	-	-
Tembilahan	305 124	1 052	149
Tembilahan Hulu	511 350	974	383
Tempuling	4 874 250	2 010	1 271
Kempas	3 664 765	1 290	1 597
Batang Tuaka	165 660	660	197
Gaung Anak Serka	1 000	500	1
Gaung	-	-	-
Mandah	460 000	2 000	93
Kateman	-	-	-
Pelangiran	8 480 894	1 242	2 886
Teluk Belengkong	10 989 420	1 696	3 282

Pulau Burung	9 768 672	1 284	4 093
Jumlah/ <i>Total</i>	41 160 197	1 245	15 110
Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, 2019			

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 41.160. 197 kg produksi kelapa hybrida bulat atau setara dengan 41.160 ton per tahun. Limbah dari industri pabrik kelapa hybrida berupa bungkil kelapa dari paberik kelapa dan ampas kelapa dari limbah rumah makan dan rumah tangga diperkirakan berpotensi 5 persen dari produksi kelapa hybrida 41.160 ton per tahun, maka didapat bahan baku berupa bungkil kelapa dari pabrik kelapa dan ampas kelapa hybrida dari limbah rumah makan dan rumah tangga sejumlah 2.051 ton per tahun.

Kecamatan	Produksi (kg)	Rata-rata Produksi (Kg/Ha)	Jumlah Petani
(1)	(2)	(3)	(4)
Keritang	66 679 551	3 753	19 144
Kemuning	102 670 596	3 474	34 370
Reteh	3 970 048	3 877	2 887
Sungai Batang	168 751	529	152
Enok	1 735 573	2 105	504
Tanah Merah	130 101	2 551	32
Kuala Indragiri	72 250	2 125	33
Concong	2 884 728	2 676	471
Tembilahan	778 734	3 933	324
Tembilahan Hulu	501 150	1 950	65
Tempuling	8 523 216	2 826	5 225
Kempas	28 367 049	3 916	6 946

Batang Tuaka	4 571 957	2 197	1 224
Gaung Anak Serka	1 300 075	2 185	227
Gaung	7 420 250	2 215	1 987
Mandah	914 046	3 109	156
Kateman	22 000	1 000	19
Pelangiran	10 663 108	3 532	2 973
Teluk Belengkong	3 225 845	1 961	2 006
Pulau Burung	1 203 180	912	731
<i>Jumlah/Total</i>	245 802 208	2 541	79 476
Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, 2019			

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 245.802. 208 kg produksi kelapa hybrida bulat atau setara dengan 245.802 ton per tahun. Limbah dari industri pabrik kelapa sawit berupa bungkil kelapa dari paberik kelapa sawit diperkirakan berpotensi 5 persen dari produksi kelapa sawit 245.802 ton per tahun, maka didapat bahan baku berupa bungkil kelapa dari pabrik kelapa sawit sejumlah 12.231 ton per tahun.

Kecamatan	Jagung			Kedelai		
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Keritang	673	1 697,31	25,22	9	10,69	11,88
Kemuning	66	165,53	25,08	-	-	-
Reteh	3	6,32	21,05	3	3,36	11,2
Sungai Batang	99	228,69	23,1	-	-	-
Enok	7	13,69	19,55	-	-	-
Tanah Merah	14	27,69	19,78	-	-	-
Kuala Indragiri	60	130,68	21,78	-	-	-
Concong	-	-	-	-	-	-

Tembilahan	15	29,34	19,56	-	-	-
Tembilahan Hulu	65	130,52	20,08	-	-	-
Tempuling	204	510,41	25,02	-	-	-
Kempas	175	437,68	25,01	10	11,91	11,91
Batang Tuaka	230	540,5	23,5	2	2,04	10,2
Gaung Anak Serka	17	31,54	18,55	-	-	-
Gaung	172	430,34	25,02	-	-	-
Mandah	40	78,6	19,65	-	-	-
Kateman	137	287,84	21,01	-	-	-
Pelangiran	55	121,22	22,04	-	-	-
Teluk Belengkong	84	179,42	21,36	-	-	-
Pulau Burung	74	163,61	22,11	-	-	-
Jumlah/Total	2 190	5.210,93	23,79	24	28,00	11,67
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 2019						

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 5.211 ton produksi jagung per tahun untuk bahan baku pakan ternak/ikan dari tepung jagung dan terdapat 28 ton per tahun untuk bahan baku pakan ternak/ikan dari kacang kedelai.

Kecamatan	Padi Sawah			Padi Ladang		
	Luas Panen Bersih (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)	Luas Panen Bersih (ha)	Produksi (ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Keritang	6 242	23 931,84	39,95	-	-	-
Kemuning	-	-	-	449	949,19	-
Reteh	3 708	14 163,71	39,81	-	-	-

Sungai Batang	2 640	9 887,17	39,02	-	-	-
Enok	140	447,89	36,12	-	-	-
Tanah Merah	-	-	-	-	-	-
Kuala Indragiri	49	177,7	37,02	-	-	-
Concong	5	17,45	36,37	-	-	-
Tembilahan	1 680	6 156,08	38,19	-	-	-
Tembilahan Hulu	2 306	8 418,97	38,05	-	-	-
Tempuling	2 034	7 437,64	38,11	-	-	-
Kempas	2 300	8 818,94	39,97	-	-	-
Batang Tuaka	6 189	22 627,54	38,12	-	-	-
Gaung Anak Serka	336	1 174,11	36,35	-	-	-
Gaung Mandah	2 140	8 055,96	39,25	-	-	-
Kateman	-	-	-	-	-	-
Pelangiran	-	-	-	-	-	-
Teluk Belengkong	-	-	-	-	-	-
Pulau Burung	-	-	-	-	-	-
Jumlah/Total	29 769	111 315,00	38,99	449	949,19	21,14
Sumber/ Source: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 2019						

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 111.315 ton padi sawah per tahun. Limbah dari padi sawah berupa dedak padi diperkirakan berpotensi 5 persen, maka didapat bahan baku berupa dedak padi sawah untuk bahan pakan ternak/ikan sejumlah 5.566 ton per tahun dan terdapat 949,19 ton padi sawah per tahun. Limbah dari padi ladang berupa dedak padi diperkirakan berpotensi 5 persen, maka didapat bahan baku berupa dedak padi ladang untuk bahan pakan ternak/ikan sejumlah 47,5 ton per tahun.

Tabel 4.7. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu dan Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2015

Kecamatan	Ubi Kayu			Ubi Jalar	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Keritang	-	-	-	-	-
Kemuning	-	-	-	-	-
Reteh	15	424	282,95	15	124,59
Sungai Batang	7	189	270,65	3	24,15
Enok	8	229	286,43	4	32,89
Tanah Merah	8	223	278,92	3	24,91
Kuala Indragiri	2	52	261,78	-	-
Concong	1	25	250,4	-	-
Tembilahan	18	489	271,89	-	-
Tembilahan Hulu	13	363	278,91	-	-
Tempuling	12	325	270,9	2	16,13
Kempas	9	254	282,74	4	32,72
Batang Tuaka	10	279	278,85	-	-
Gaung Anak Serka	21	569	270,81	14	113,9
Gaung	4	110	275,86	2	16,06
Mandah	6	162	269,32	3	24,3
Kateman	4	106	265,33	4	32,83
Pelangiran	2	56	277,51	-	-
Teluk Belengkong	4	109	271,92	3	25,25
Pulau Burung	5	135	270,24	4	33,27
<i>Jumlah/Total</i>	149	4 099	275,17	61	501,00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 2019

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 4.099 ton produksi ubi kayu per tahun untuk bahan baku pakan ternak/ikan dari tepung ubi kayu dan terdapat 501 ton per tahun untuk bahan baku pakan ternak/ikan dari tepung ubi jalar.

Tabel 4.8. Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Indragiri Hilir (ekor), 2015

Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Keritang	167	-	48	13
Kemuning	51	-	63	10
Reteh	154	-	29	10
Sungai Batang	100	-	51	-
Enok	57	-	35	-
Tanah Merah	46	-	67	-
Kuala Indragiri	22	-	14	-
Concong	69	-	27	-
Tembilahan	1 339	-	1 868	26
Tembilahan Hulu	116	-	138	7
Tempuling	67	-	12	-
Kempas	121	-	95	1
Batang Tuaka	56	-	19	-
Gaung Anak Serka	82	-	36	-
Gaung	76	-	27	-
Mandah	71	-	53	-
Kateman	110	-	225	2
Pelangiran	96	-	45	2
Teluk	62	-	36	8
Belengkong	67	-	48	6
Pulau Burung	67	-	48	6
<i>Jumlah/Total</i>	2 929	-	2 936	85

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 2019

Tabel 4.8. menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 2.929 ekor sapi yang di potong per tahun setara dengan 600.000 kg atau 600 ton berat sapi. Limbah dari sapi yang dipotong dapat di jadikan tepung tulang, diperkirakan berpotensi 10 persen dari 600 ton berat sapi akan menghasilkan 60 ton tepung tulang, dan terdapat 2.936 ekor kambing dan 85 ekor domba yang di potong per tahun setara dengan 90.000 kg atau 90 ton

berat kambing dan domba. Limbah dari kambing dan domba yang dipotong dapat di jadikan tepung tulang, diperkirakan berpotensi 10 persen dari 90 ton berat kambing dan domba akan menghasilkan 9 ton tepung tulang.

Tabel 4.9. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Indragiri Hilir (ton), 2014-2015

Kecamatan	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Keritang	-	-	355,95	373,75	355,95	373,75
Kemuning	-	-	42,94	45,09	42,94	45,09
ReteH	1 518,58	1 564,14	80,37	84,39	1 598,95	1 648,53
Sungai Batang	4 517,30	4 652,82	177,85	186,74	4 695,15	4 839,56
Enok	-	-	407,93	428,33	407,93	428,33
Tanah Merah	9 198,23	9 474,18	108,60	264,03	12 306,83	12 738,21
Kuindra	7 127,34	7 341,16	70,76	74,30	7 198,10	7 415,46
Concong	8 870,50	9 136,62	664,44	697,66	9 534,94	9 834,28
Tembilahan	-	-	294,93	309,68	294,93	309,68
Tbh, Hulu	-	-	253,12	265,78	253,12	265,78
Tempuling	-	-	473,47	497,14	473,47	497,14
Kempas	-	-	266,68	280,01	266,68	280,01
Batang Tuaka	-	-	258,77	271,71	258,77	271,71
GAS	224,56	231,30	68,11	71,52	292,67	302,82
Gaung	157,79	162,52	384,61	403,84	542,40	566,36
Mandah	7 114,59	7 328,02	438,33	460,25	7 552,92	7 788,27
Kateman	3 963,93	4 082,85	113,11	118,77	4 077,04	4 201,62
Pelangiran	-	-	77,97	81,87	77,97	81,87
Teluk Belengkong	-	-	112,06	117,66	112,06	117,66
Pulau Burung	-	-	44,07	46,27	44,07	46,27

Jumlah/Total	42 692,82	43 973,61	7 694,07	8 078,79	50 386,89	52 052,40
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, 2019						

Tabel 4.9. menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 50.386,89 ton produksi ikan, kepiting dan sumber laut lainnya per tahun. Limbah dari ikan, kepiting dan sumber laut lainnya dapat di jadikan tepung ikan, diperkirakan berpotensi 10 persen dari 50.386,89 ton akan menghasilkan 50,4 ton tepung ikan, kepiting dan sumber perairan lainnya.

Tabel 4.10. Populasi Unggas Betina Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Indragiri Hilir (ekor), 2015

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Keritang	68 620	-	-	1 730
Kemuning	45 189	-	-	793
Reteh	38 503	-	-	2 048
Sungai Batang	42 908	-	-	1 384
Enok	61 113	-	-	985
Tanah Merah	31 661	-	-	720
Kuala Indragiri	49 340	-	-	367
Concong	26 926	-	-	163
Tembilahan	47 709	-	-	1 940
Tembilahan Hulu	29 865	-	-	1 407
Tempuling	24 704	-	-	549
Kempas	63 480	-	-	442
Batang Tuaka	47 669	-	-	1 256
Gaung Anak Serka	53 089	-	-	214
Gaung	71 581	-	-	1 221
Mandah	42 936	-	-	420
Kateman	62 508	-	-	689
Pelangiran	30 937	-	-	126
Teluk Belengkong	64 003	-	-	2 958

Pulau Burung	67 788	-	-	2 494
Jumlah/ <i>Total</i>	970 529	-	-	21 906
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir				

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 970.529 ekor ayam kampung betina setara dengan 970,5 ton per tahun. Limbah dari tulang ayam kampung dapat di jadikan tepung tulang, diperkirakan berpotensi 10 persen dari 970,5 ton akan menghasilkan 97,1 ton tepung tulang ayam kampung betina. Terdapat 21.906 ekor itik betina setara dengan 21,9 ton per tahun . Limbah dari tulang itik dapat di jadikan tepung tulang, diperkirakan berpotensi 10 persen dari 21,9 ton akan menghasilkan 2,2 ton tepung tulang itik betina.

Tabel 4.11. Populasi Unggas Jantan Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Indragiri Hilir (ekor), 2015

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Keritang	13 157	-	3 824	657
Kemuning	8 319	-	2 288	296
Reteh	9 629	-	121	696
Sungai Batang	8 193	-	415	519
Enok	18 172	-	144	367
Tanah Merah	6 041	-	575	272
Kuala Indragiri	9 158	-	758	134
Concong	9 945	-	1 409	64
Tembilahan	17 654	-	275 485	655
Tembilahan Hulu	4 893	-	472 240	509
Tempuling	7 486	-	181	222
Kempas	11 469	-	168	182

Batang Tuaka	27 839	-	446	459
Gaung Anak Serka	24 210	-	83	84
Gaung	12 330	-	55	471
Mandah	7 396	-	85	165
Kateman	6 127	-	3 135	280
Pelangiran	2 124	-	820	50
Teluk Belengkong	8 487	-	39	1 081
Pulau Burung	12 689	-	53	980
<i>Jumlah/Total</i>	225 318	-	762 324	8 143
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir				

Tabel 4.11. menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 225.318 ekor ayam kampung jantan setara dengan 225,3 ton per tahun. Limbah dari tulang ayam kampung jantan dapat di jadikan tepung tulang, diperkirakan berpotensi 10 persen dari 225,3 ton akan menghasilkan 22,5 ton tepung tulang ayam kampung jantan. Terdapat 762.324 ekor ayam pedaging setara dengan 762,3 ton per tahun . Limbah dari tulang ayam pedaging dapat di jadikan tepung tulang, diperkirakan berpotensi 10 persen dari 762,3 ton akan menghasilkan 76,2 ton tepung tulang ayam pedaging. Terdapat 8.143 ekor itik jantan setara dengan 8,1 ton per tahun. Limbah dari tulang itik jantan dapat di jadikan tepung tulang, diperkirakan berpotensi 10 persen dari 8,1 ton akan menghasilkan 0,8 ton tepung tulang itik jantan.

No	Uraian	Populasi Total	Populasi Produktif	Produksi/ <i>Production</i>	
				Butir	Kg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Ayam Ras Petelur	-	-	-	-
2	Ayam Buras	936 167	279 539	8 377 802	465 433
3	Itik	29 559	17 292	518 241	39 865
4	Puyuh	18 135	14 617	438 066	5 476
5	Angsa	565	280	8 399	1 050
6	Kalkun	10	5	146	18
Jumlah				9 342 654	511 842

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, 2019

Tabel 4.12. menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 511.842 kg telur unggas sama dengan 511,8 ton telur unggas per tahun. Limbah dari kulit telur unggas dapat di jadikan tepung kapur cangkang telur unggas, diperkirakan berpotensi 1 persen dari 511,8 ton akan menghasilkan 5,1 ton tepung kapur cangkang telur unggas.

Tabel.4.13. Potensi Jumlah Bahan Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir (Dalam Ton Per Tahun)

No.	Jenis Bahan Pakan Ternak dan Ikan	Produksi per tahun (ton)
01.	Bungkil & Ampas Kelapa Dalam (Nior)	14.953,0
02.	Bungkil & Ampas Kelapa Hybrida	2.051,0
03.	Bungkil & Ampas Kelapa	12.231,0
04.	Tepung Jagung	5.211,0
05.	Kacang Kedelai	28,0
06.	Dedak Padi Sawah	5.566,0
07.	Dedak Padi Ladang	47,5
08.	Tepung Ubi Kayu	4.099,0
09.	Tepung Ubi Jalar	501,0
10.	Tepung Tulang Sapi	90,0
11.	Tepung Tulang Kambing dan Domba	9,0
12.	Tepung Tulang Ayam Kampong Betina	97,1
13.	Tepung Tulang Itik Betina	2,2
14.	Tepung Tulang Ayam Kampong Jantan	22,5
15.	Tepung Tulang Ayam Pedaging	76,2
16.	Tepung Tulang Itik Jantan	0,8
17.	Tepung Kapur Cangkang Telor Unggas	5,1

18.	Tepung Ikan, Kepiting dan Siput Luat	50,4
	Jumlah	45.040,8

Sumber : Data Olahan, 2019

Tabel.4.13. menunjukkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat potensi 45.040,8 ton per tahun bahan baku untuk produksi pakan ternak unggas, pakan ternak dan pakan ikan. Jika pakan tersebut diperuntukkan budidaya maka akan menghasilkan produksi, antara lain :

1. Jika 15.000 ton bahan pakan diperuntukkan ternak unggas akan menghasilkan 15.000.000 ekor unggas per tahun dengan berat panen rata-rata 1 kg unggas per ekor.
2. Jika 15.000 ton bahan pakan diperuntukkan penggemukan ternak sapi akan menghasilkan pertumbuhan 7.500.000 kg berat sapi atau setara dengan 30.000 ekor sapi (rata-rata berat 250 kg/ekor) per tahun.
3. Jika 15.040,8 ton diperuntukkan pemeliharaan ikan akan menghasilkan pertumbuhan 7.502.000 kg berat ikan atau setara dengan 15.004.000 ekor ikan (rata-rata berat 0,5 kg/ekor) per tahun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Strategi pembangunan kontekstual terpadu sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan adalah sebagai proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan berkaitan dengan pilihan kebijakan program, kegiatan dan proyek pembangunan yang berdasarkan potensi alam dan sosial budaya usaha tani di sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sebagai upaya sinergitas produksi, pengolahan pasca panen sampai memasarkan produk.
2. Pembangunan perdesaan secara nasional tidak mungkin dapat disamaratakan, mengingat perdesaan di Indonesia mempunyai ciri-ciri : umumnya kepadatan penduduk tidak terlalu tinggi, tingkat pendidikan rendah, keadaan alam dan geografis berbeda, kegiatan usaha utama adalah pertanian (termasuk kehutanan, peternakan, perikanan), tingkat pendapatan masyarakat relatif rendah, masyarakat relatif homogen dalam hal mata pencaharian, agama dan adat istiadat. Hasil penelitian menunjukkan sejalan dengan penelitian Findley (Saefullah, 1995 : 13) bahwa pembangunan harus dilakukan dengan model pendekatan kontekstual yang sesuai dengan sifat dan cirinya, dan tidak dapat disamaratakan begitu saja antara model dan pendekatan pembangunan antara desa yang satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan itu pembangunan suatu wilayah/daerah harus meliputi upaya-upaya besar yang satu sama lain saling berkaitan. Dengan melakukan pendekatan sistem (Winardi, 1999:149) semua upaya tersebut dijadikan masukan dalam proses pembangunan. Kemudian,

proses pembangunan wilayah/daerah tetap pula melaksanakan manajemen pembangunan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan. Kesemuanya itu merupakan suatu proses dari fungsi manajemen yang sepenuhnya merupakan partisipasi masyarakat setempat tanpa campur tangan berlebihan dari pihak luar dan kekuasaan di atasnya. Sejalan pula dengan upaya pemberdayaan masyarakat maka pelaksanaan pembangunan di perdesaan disesuaikan pula dengan faktor historis desa, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, nilai sosial budaya dan nilai agamanya yang merupakan faktor-faktor lingkungan yang ikut berpengaruh (Friedmann, 1981:42; Bryant dan White, 1982:369; Findley, 1987 : 19; Saefullah, 1995 : 13).

3. Potensi sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang sangat strategis, Indragiri Hilir mengembangkan kawasannya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Riau. Pemanfaatan lahan sawah dan ladang di Indragiri Hilir masih sangat rendah yaitu sebagian besar masyarakat tani melakukan penanaman padi dalam satu tahun hanya sekali dengan menggunakan varietas padi yang berumur 5-6 bulan. Sisa waktu 6 bulan sawah yang dalam keadaan terlantar karena musim kemarau seharusnya dapat dioptimasi dengan penanaman tanaman palawija dan tanaman semusim lainnya. Riset ini telah menguji proposisi bagaimana masyarakat tani sebaiknya melakukan usaha-usaha kreatif dan inovatif dalam mengatasi permasalahan pertanian dan permintaan pasar dengan memaksimalkan intensifikasi lahan pola tanam tumpang sari dan rotasi, usaha tani subsektor tanaman pangan, palawija dan

hortikultura, selain padi sawah. Pemanfaatan sawah yang tidak hanya ditanam satu tahun sekali yang hanya terfokus pada padi sawah, selanjutnya diarahkan ke pola tanam rotasi tanaman ke tanaman pangan lainnya palawija dan lahan hortikultura. Demikian juga di sektor perkebunan, perikanan dan peternakan, belum ada keterpaduan semua sektor tidak terintegrasi ke dalam suatu pola yang terpadu. Setelah pasca panen petani diharapkan juga mampu melaksanakan usaha pasca panen dengan proses kemasan dan pengolahan produk lanjutan, misalnya pakan ternak dan pakan ikan, sehingga lebih ekonomis dan memiliki nilai tambah. Saat ini (2019) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten INHIL yaitu 48,37 persen.

4. Potensi lahan untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah seluas 722.806 Ha. dan telah dimanfaatkan sekitar 600.691 Ha. Peluang investasi bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari penangkapan di perairan laut, budidaya air payau (tambak), budidaya laut (keramba jaring apung), budidaya air tawar (minatani) dan pengolahan tepung ikan. Potensi perikanan tangkap di perairan laut sebesar 109,212 ton/th dengan tingkat pemanfaatan pada tahun 2019 sebesar 35.277,76 ton/th (32,30 %), dibidang budidaya perikanan daerah ini memiliki potensi lahan untuk pengembangan budidaya tambak seluas 31.600 ha dengan tingkat pemanfaatan 1.399 ha (4,42 %) dan budidaya air tawar (minatani) dengan potensi sebesar 1.657 ha baru dimanfaatkan sebesar 166 ha (10%). Sementara dibidang budidaya laut berupa pemeliharaan ikan didalam keramba jaring apung tersedia

luas areal potensial yang dapat menampung sekitar 20.000 kantong keramba, dimana sampai saat ini belum dimanfaatkan. Disamping itu terbuka peluang investasi dibidang industri pembuatan tepung ikan/udang, hal ini didukung dengan tersedianya bahan baku dari komoditi perikanan berupa ikan rucah yang cukup banyak yaitu sekitar 10.518,48 ton/th. Pengembangan perkebunan masih tersedia lahan seluas 205.294 ha dengan berbagai komoditi, untuk pengembangan usaha peternakan peternak besar dan unggas dengan di prioritaskan pada usaha ternak sapi potong, sedangkan untuk potensi pengembangan dan Investasi di bidang kelautan dan perikanan adalah usaha budidaya perikanan air payau (tambak) dengan luas kawasan 3.160 ha yang tersebar di 8 kecamatan dan ini telah dilakukan studi identifikasi dan disain Kecamatan Kateman seluas 994,970 ha dan Kecamatan Kuala Indragiri seluas 951,65 ha, budi daya kerang darah (*Anadara granosa*) dengan yg tersebar pada 4 kecamatan (Kuindra, Reteh, Tanah Merah dan Mandah) dengan luas areal 2.490 ha dan budidaya kerambah jaring apung dapat dikembangkan sebanyak 20.000 unit (setiap 1 unit = 10 kantong) yang baru dimanfaatkan sebanyak 120 kantong. Luas kawasan industri yang telah dipersiapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan akan dikembangkan adalah seluas 880 Ha (BPS Kabupaten INHIL, 2019).

5. Kabupaten Indragiri Hilir terdapat potensi 45.040,8 ton per tahun bahan baku untuk produksi pakan ternak unggas, pakan ternak dan pakan ikan. Jika pakan tersebut diperuntukkan budidaya maka akan menghasilkan produksi, antara lain :

- a. Jika 15.000 ton bahan pakan diperuntukkan ternak unggas akan menghasilkan 15.000.000 ekor unggas per tahun dengan berat panen rata-rata 1 kg unggas per ekor.
- b. Jika 15.000 ton bahan pakan diperuntukkan penggemukan ternak sapi akan menghasilkan pertumbuhan 7.500.000 kg berat sapi atau setara dengan 30.000 ekor sapi (rata-rata berat 250 kg/ekor) per tahun.
- c. Jika 15.040,8 ton diperuntukkan pemeliharaan ikan akan menghasilkan pertumbuhan 7.502.000 kg berat ikan atau setara dengan 15.004.000 ekor ikan (rata-rata berat 0,5 kg/ekor) per tahun.

5.2. Saran-Saran

1. Perlu keterpaduan dan saling mengisi pembangunan semua sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan industrialisasi, hulu dan hilirisasi yang terintegrasi ke dalam suatu pusat pengembangan kawasan pembangunan dengan manajemen pembangunan strategis, terintegrasi dan holistik. Pemantapan manajemen produksi, proses dan pemasaran hasil. Setelah pasca panen petani diharapkan juga mampu melaksanakan usaha pasca panen dengan proses kemasan dan pengolahan produk lanjutan, misalnya pakan ternak dan pakan ikan, sehingga lebih ekonomis dan memiliki nilai tambah.
2. Perlu mengarahkan masyarakat melakukan kegiatan pertanian sesuai kondisi lahan dan kondisi permintaan pasar. Tidak jarang masyarakat perdesaan kurang memahami bagaimana bertani yang produktif dan efisien. Ini harus diakui karena kita menyadari masyarakat perdesaan kurang pengetahuan dan teknologi pertaniannya. Melalui pembinaan kepada masyarakat formal dan informal dan

akhirnya akan diikuti masyarakat lainnya di desa, melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, dll yang harus selalu produktif dan efisien harus selalu diterapkan. Misalnya pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan, misalnya: tanah yang berawa tidak mungkin cocok untuk tanaman untuk daerah dataran tinggi. Termasuk disini iklim dan curah hujannya. Konsekuensinya supaya menghindari pemborosan tenaga, biaya dalam mengolah pertanian. Logikanya tanaman akan subur dan berkembang dengan baik jika ditanam ditempat yang disukai. Dan selain dari itu juga diprioritaskan tanaman yang ditanam atau usaha yang dilakukan dalam kegiatan pertanian mengacu kepada permintaan pasar. Artinya jika suatu hasil pertanian yang sudah selalu tersedia di pasar dan berlebih-lebihan janganlah memilih atau memprioritaskan hasil pertanian yang sudah selalu tersedia di pasar dan berlebih-lebihan janganlah memilih atau memprioritaskan hasil pertanian seperti ini. Karena akan mengakibatkan menurunnya harga penjualan, karena menurut hukum pasar, apabila barang selalu tersedia sementara permintaan berkurang maka harga akan turun (atau sebaliknya). Jika harga produksi pertanian turun maka niscaya akan mempengaruhi tingkat pendapatan pertanian.

3. Selain itu juga para petani harus diarahkan menanam tanaman yang tumbal sulam, artinya ada kombinasi antara tanaman keras (perkebunan) dan tanaman palawija, pangan, tanaman hortikultura atau tanaman sebagian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan petani sehari-hari, misalnya jagung, ubi, kacang-kacangan, buah-buahan, kunyit, halia, lengkuas, tomat, cabe, dll sebagainya. Selain itu juga peternakan: ayam, itik, kambing, dll sebagainya.

4. Perlu segera merencanakan (*masterplan*) dan mengimpimentasikan *pembangunan* Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sentra pakan ikan dan ternak dengan memanfaatkan potensi 45.040,8 ton per tahun bahan baku untuk produksi pakan ternak unggas, pakan ternak dan pakan ikan. Jika pakan tersebut diperuntukkan budidaya maka akan menghasilkan produksi, antara lain :
- a. Jika 15.000 ton bahan pakan diperuntukkan ternak unggas akan menghasilkan 15.000.000 ekor unggas per tahun dengan berat panen rata rata 1 kg unggas per ekor.
 - b. Jika 15.000 ton bahan pakan diperuntukkan penggemukan ternak sapi akan menghasilkan pertumbuhan 7.500.000 kg berat sapi atau setara dengan 30.000 ekor sapi (rata-rata berat 250 kg/ekor) per tahun.
 - c. Jika 15.040,8 ton diperuntukkan pemeliharaan ikan akan menghasilkan pertumbuhan 7.502.000 kg berat ikan atau setara dengan 15.004.000 ekor ikan (rata-rata berat 0,5 kg/ekor) per tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Beling dan Totten. 1985. *Modernisasi, Masalah Model Pembangunan*. Terjemahan oleh Mien Joebhar dan Hasan Basari. Jakarta : CV Rajawali.
- Bryant, Coralie dan Louise G. White. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta : LP3ES.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : Gramedia.
- Esman, Milton J. 1972. *Institution Building and Development : from Concepts to Application*. London : Sage Publication.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta : CIDES.

- Rostow, W W. 1960. *The Stages of Economic Growth*. Cambridge University.
- Sufian. 1997. *Teori Administrasi Pembangunan*, UIR Press
- 1998. *Model Pembangunan Perdesaan yang Kontekstual*, UIR Press
- 2003. *Manajemen Strategis Dalam Pembangunan*, UIR Press.
- 2003. *Manajemen Strategis Pembangunan Daerah dan Perdesaan*, UIR Press.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Todaro, Michael P. 1995. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*. Terjemahan Agustinus Subekti. Jakarta : Bumi Aksara
- BPS, Kabupaten Indragiri Hilir, 2019
- Zulhelmi, Cut Aida Fitri M. Aman Yaman. 2016. Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah Volume 1, Nomor 1, November 2016
www.jim.unsyiah.ac.id/JFP
- Harwi Kusnadi. 2014. Makalah disampaikan pada Kegiatan Penelitian Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong. Peneliti Pertama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu bptp-bengkulu@litbang.deptan.go.id

Lampiran 1. Model Manajemen Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu



Gambar 1 . Model Pembangunan Perdesaan yang Kontekstual

Sumber : Modifikasi Model Pembangunan Perdesaan yang Kontekstual (Friedmann, 1981:42; Bryant dan White, 1982:369; Findley, 1987 : 19; Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, 1993 : 15-17; Saefullah, 1995 : 13; Winardi, 1999).

Lampiran 2. Surat Pernyataan Original Ketua Peneliti

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Prof. Dr. H. Sufian, SH, M.Si
NIDN : 1012026703
Pangkat/Golongan : Pembina Utama
Jabatan Fungsional : Guru Besar/IV-d
Nomor HP : 0811764589

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul “Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Industrialisasi Pengolahan Menjadi Pakan ternak/Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir” yang diusulkan dalam skema penelitian Dosen tahun 2019 bersifat Original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga survei oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksamaan dengan pernyataan ini, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah saya terima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan Sebenar-benarnya.

Pekanbaru, November 2019
Ketua



Prof. Dr. H. Sufian, S.H, M.Si
NIP/NIK : 1012026703

Lampiran I. Personalia Penelitian

N O	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu	Uraian Tugas
1	Prof. Dr. H.Sufian, SH, M.Si	UIR	Administrasi Publik	32 Minggu	Observasi dan Pengolahan Data
2	Lolita Vianda, S. Sos, M.Pd	UIR	Administrasi Publik	32 Minggu	Observasi dan Pengolahan Data
3	Nurlina	UIR	Administrasi Publik	32 Minggu	Observasi dan Pengolahan Data

Lampiran II. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

I. Ketua Peneliti

BIODATA (CV)

I. Identitas :

1. Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Sufian Hamim, M.Si
2. No. KTP : 1471091202670063
3. N.I.D.N. : 1012026703
4. Alamat Tetap : Jl. Kartama No. 20 Pekanbaru (Riau) HP/Wa. 0811764589
Email : sufianhamim@gmail.com/sufianhamim@soc.uir.ac.id
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Cawan (Tembilahan), 12 Februari 1967
4. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Melayu
5. Pekerjaan : Profesor Tetap Fisip dan Pascasarjana Universitas Islam Riau
6. Pangkat/Golongan : Pembina Utama / IV-d
7. Jabatan Fungsional : Profesor Administrasi Publik UIR, Sejak Tahun 2005-Sekarang

II. Riwayat Pendidikan :

A. Pendidikan Formal :

1. Sekolah Dasar Negeri 3 Tembilahan, Berijazah Tahun 1973-1979
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tembilahan, Berijazah Tahun 1979-1982
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tembilahan, Berijazah Tahun 1982-1985
4. S1 : Ilmu Hukum Ketatanegaraan UIR, Berijazah Tahun 1985-1989
5. S2 : Ilmu Administrasi Publik UNPAD, Berijazah Tahun 1992-1994
6. S3 : Ilmu Administrasi UNPAD, Berijazah Tahun 1997-2002

B. Pendidikan Non Formal :

1. Internship Pusat Antar Universitas Program Studi Pembangunan (3 bulan), PAU-Studi Sosial-UGM, di Yogyakarta Tahun 1990
2. Kursus Manajemen dan Informatika (6 bulan), di LAMI Pekanbaru Tahun 1991
3. Pendidikan Kepengacaraan/ADVOCAD, 1988
4. Kursus Statistik Path Analisis dan SEM dengan Program Lisrel dan SPSS, 2000

III. Riwayat Pekerjaan :

1. Rektor Universitas Islam Indragiri (UNISI), Tahun 2007-2013
2. Direktur Pascasarjana (S2) Kerjasama UIR-UNPAD, 2003-2006
3. Komisaris Independen Bank Riau-Kepri, Tahun 2007-2012
4. Staf Ahli Gubernur Riau, Tahun 2003-2012
5. Staf Ahli DPRD Provinsi Riau, Tahun 2002-2004
6. Staf Ahli Bupati Indragiri Hilir, Tahun 2003-2013
7. Sekretaris Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Riau, 2012-Sekarang
8. Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi Riau, Tahun 2010-2015
9. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fisip UIR, Tahun 1991-1992
10. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UIR, 2003-2004
11. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fisip UIR, Tahun 1994-1997
12. Pembantu Dekan I Fisip UIR, Tahun 1994-1997
13. PJS Dekan Fisip UIR, Tahun 1997
14. Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Siasat Fisip UIR, 2002-2004
15. Direktur Pusat Penelitian Daerah Fisip UIR, 1994-1997
16. Pengacara Praktek (Advocad), Sejak Tahun 1998 Sampai Sekarang Izin No. W4. Da.142. Kp. 04. 13-Tahun 1988
17. Anggota Dewan Riset Provinsi Riau, Tahun 1992-2004
18. Dosen Tetap (S1) Fisip Universitas Islam Riau, Sejak Tahun 1990 Sampai Sekarang
19. Dosen Fakultas (S1) Hukum Universitas Islam Riau, 1990-1991
20. Dosen Fakultas (S1) Ekonomi Universitas Islam Riau, 2002-2003.
21. Dosen Pascasarjana (S2) Fisip UNPAD, 2003-2008
22. Dosen Pascasarjana (S2) Administrasi UIR, 2007- Sekarang
23. Dosen Pascasarjana (S2) Ilmu Pemerintahan UIR, 2007-Sekarang
24. Dosen Pascasarjana (S2) Prodi Ilmu Hukum UIR-UII, 2002-2004.
25. Dosen Pascasarjana (S2) Prodi Ilmu Hukum UIR, 2004-2008.
26. Dosen Pascasarjana (S2) P.S. Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis UNRI, 2002-2005
27. Dosen Pascasarjana (S2) P.S. Ilmu Politik dan Pemerintahan Daerah UNRI, 2002-2006
28. Dosen Pascasarjana (S2) P.S. Magister Manajemen Surapati, Jakarta 2002-2006
29. Dosen Pascasarjana (S2) P.S. Perencanaan Lingkungan UNRI, 2002-2004
30. Dosen Pascasarjana (S2) P.S. Agribisnis UIR, 2007-2008

IV. Menulis Buku Referensi :

1. Pengantar Tata (Sistem) Hukum Indonesia, UIR Press, 1994
2. Administrasi, Organisasi dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep dan Aplikasi, UIR Press 1995
3. Pengantar Ilmu Administrasi, UIR Press 1996
4. Manajemen Pembangunan Perdesaan, UIR Press 1997

5. Manajemen Sumber Daya Manusia, UIR Press, 1998
6. Teori Administrasi Pembangunan, UIR Press 1999
7. Model Pembangunan Perdesaan yang Kontekstual, UIR Press 1999
8. Sistem Perencanaan Strategis, UIR Press 2000
9. Manajemen Informasi Sistem, UIR Press 2001
10. Manajemen Strategis Sumber Daya Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Daerah, UIR Press 2002
11. Manajemen Sumber Daya Manusia, UIR Press 2003
12. Teori Organisasi, UIR Press 2004
13. Struktur dan Perilaku Organisasi, UIR Press 2006
14. Organisasi dan Manajmen, UIR Press 2014
15. Hukum Bisnis, UIR Press 2013
16. Manajemen Strategis Sebagai Kerangka Acuan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Sejahtera, UIR Press 2014
17. Manajemen Strategis, UIR Press 2013
18. Manajemen Sumber Daya Manusia, UIR Press 2015
19. Sistem Perencanaan satrategis Dalam Pembangunan, UIR Press 2015
20. Administrasi, Organisasi dan Manajemen, UIR Press 2016
21. Manajemen Strategis Pembangunan Daerah dan Perdesaan, UIR Press 2016
22. Manajemen Strategis, UIR Press 2016
23. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Ilmu Sosial, UIR Press 2017
24. Peran dan Dinamika Dewan Komisaris Bank Daerah, UIR Pres 2017
25. Administrasi dan Manajemen Pembangunan, UIR Press 2017
26. Manajemen Strategis Pemerintahan, UIR Press 2018
27. Organisasi Birokrasi dan Manajemen Pemerintahan, UIR Press 2019

V. Publikasi Artikel di Jurnal :

1. Transpormasi Sosial Budaya yang Dapat Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bangsa, Jurnal Mahkamah, Hukum UIR, No. 15 Volume IX, Oktober 1998
2. Pembangunan Masyarakat Perdesaan, Jurnal Mahkamah, Hukum UIR, Edisi 11, Oktober 1996
3. Hubungan Anatomi/Komponen Ilmu Dengan Metode Ilmiah, Jurnal Mahkamah, Hukum UIR, Edisi 9, Agustus 1995
4. Penerapan Manajemen Strategis Pada Organisasi Publik dan Nonprofit, Jurnal Ekonomi JEK., Fekon UIR, Vol. III, Nomor 8, April 2001
5. Perencanaan Strategi dan Terpinggirnya Masyarakat Tempatan Dalam Proses Pembangunan, Jurnal Siasat FISIP UIR, Vol 10 No. 2, Agustus 2001
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Perdesaan, Jurnal Siasat FISIP UIR Vol. 9 No. 1 Februari 2001
7. Reformasi Sistem Kompensasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Kerja, Jurnal Siasat FISIP UIR No. 7 Tahun IV, Juni 1999
8. Ekonomi Rakyat, Jurnal Siasat FISIP UIR, 1998
9. Usaha-Usaha Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri, Jurnal Siasat FISIP UIR, No. 3 Tahun II , 1996

10. Kepemimpinan Situasional, Jurnal Siasat FISIP UIR, Edisi Juli-Desember 1995
11. Peran Politik Administrasi Lapangan, Jurnal Siasat FISIP UIR, Edisi Juli 1996
12. Memotivasi Sumber Daya Manusia, Jurnal Siasat FISIP UIR, Edisi Juli 1997
13. Manajemen Strategis Sumber-sumber Daya Pembangunan, Jurnal Siasat FISIP UIR, Vol. 11 No. 1 Juli 2002
14. Pemilihan Tanaman Berdasarkan Permintaan Pasar, Jurnal ALAM Faperta UIR, Agustus 2003
15. Strategi Pembangunan Riau Mencapai Visi 2020 di Asia Tenggara, Jurnal Industri Perkotaan Fisip UNRI, Mei 2003
16. Manajemen Strategis Pembangunan Perdesaan, Jurnal Ekonomi UNPAD, Juli 2004
17. Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Kampar, Jurnal Siasat FISIP UIR, 2004. Volume dan ISSN : 13,2,1410-1807
18. Perkembangan Otonomi Desa di Indonesia, Jurnal Siasat FISIP UIR, 2004. Volume dan ISSN : 13,1,1410-1807
19. Membangun Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan Berinvestasi di Kabupaten/Kota, Jurnal Siasat FISIP UIR, 2003. Volume dan ISSN: 12,2,1410-1807
20. *Feasibility Study of Expansion South Riau Indonesia District Pelalawan Regency. International Journal of Innovation, Creativity and Change*, ISSN: 2201-1315. Published in the Regular Issue of December 2019. First Author, Scopus Q3
21. *Open System of Strategic Planning for the Development of Rural Autonomy in Riau - Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change*, ISSN: 2201-1315. Published in the Regular Issue of December 2019. First Author, Scopus Q3

VI. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat :

1. Penelitian Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Talawi Payakumbuh, 1988
2. Penelitian Koordinasi Instansi Vertikal dan Dinas Daerah di Kota Pekanbaru. 1989. Skripsi Pembimbing Utama Drs. H. Basyarudin Nur
3. Penelitian Perencanaan Berdasarkan Situasi dan Kondisi Merupakan Salahsatu Diterminan Pokok Dalam Menentukan Target Retribusi Daerah di DISPENDA Kotamadya Pekanbaru. 1994. Tesis Promotor Prof. Dr. Winardi, SE
4. Penelitian Model Pembangunan Perdesaan Kontekstual. 1997-1998 Topik Khusus Desertasi, Promotor Prof. Dr. H. A, Djadja Saefullah, Drs., MA
5. Penelitian Sistem Perencanaan Dalam Pembangunan: Studi Sistem Terbuka Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan Perdesaan Kontekstual di

- Provinsi Riau (di 9 Desa). 1997-2001. Desertasi, Promotor Prof. Dr. Winardi, SE dan Prof. Dr. H. A, Djadja Saefullah, Drs., MA
6. Penelitian Sistem Pola Pertanian Terpadu di Desa Penyengat Kabupaten Siak (2003), di Desa Jaya Kabupaten Kuansing (2004), di Desa Tambak Kabupaten Pelalawan (2005), di Desa Mumpa Kabupaten Indragiri Hilir (2006)
 7. Penelitian Membangun Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan Berinvestasi di Pemko Rokan Hulu, 2003.
 8. Penelitian Tri Agro Mandiri Kajian Pembangunan di Indragiri Hulu, 2003
 9. Penelitian Standard Harga Barang dan Jasa Pemko Kunasing, 2004
 10. Penelitian Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Kampar, 2004
 11. Penelitian Standard Harga Barang dan Jasa Pemprov Riau, 2005
 12. Penelitian Sistem Pelayanan Terpadu dan E-Government Pemko Pekanbaru, 2006
 13. Penelitian Peran dan Dinamika Dewan Komisaris Bank Daerah, Studi di Bank Pembangunan Daerah Riau, 2007-20012
 14. Penelitian Kajian Integrasi Kawasan Pusat Ekonomi Kabupaten Pelalawan, INHU dan INHIL, Kementrian PDT, 2008.
 15. Penelitian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir Menjadi Kota Indragiri, Kabupaten Indragiri Selatan dan Kabupaten Indragiri Hilir, 2007-2009.
 16. Penelitian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Pelalawan Selatan, 2018
 17. Penelitian Strategi Pembangunan Kontekstual Terpadu di Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Industrialisasi Pengolahan Hasil di Kabupaten Indragiri Hilir, 2019
 18. Pengabdian Masyarakat Sosialisasi UU Desa di Kabupaten Indragiri Hilir, 2018
 19. Pengabdian Masyarakat Sosialisasi UU Desa di Kabupaten Pelalawan, 2019
 20. Pengabdian Masyarakat Sosialisasi UU Desa di Kabupaten Kampar, 2019
 21. PKM : Manajemen dan Efisiensi Usaha Kelompok Tani Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. Usulan LPPM UIR periode ke-2, 2019.
 22. PPDM : Pulau Cawan Sebagai Desa Nelayan dan Pariwisata Penelitian Ekologi Hutan Mangrove Dunia. Usulan Skema Hibah Bersaing Dikti 2019

VII. Kegiatan Seminar :

1. Pemakalah Pada Seminar Dewan Riset Daerah Riau, Pekanbaru, DRD10 Agustus 2002
2. Pemakalah Pada Seminar Perumusan Kepemimpinan Riau, Pekanbaru LSM BAPESRI, 28 Mei 2002
3. Pemakalah Pada Seminar Otonomi Daerah, Pekanbaru, UIR, 25 April 2002

4. Pemakalah Pada Seminar Refleksi dan Perpektif 3 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tanjung Pinang, 6 Juni 2002
5. Juara I Anugerah Ilmiah Sebagai Peneliti Terbaik Tingkat Universitas Islam Riau, 27 April 2002
6. Sebagai Moderator Diskusi Panel Tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi yang Profesional, UIR, 2 Mei 2002 Sebagai Moderator Konstituen Meeting antara DPR dengan Masyarakat Kampar, LSM Cetro Kerjasama Dengan LSM LPAD, Bangkinang 27 Juli 2002.

VIII. HAKI (KI) :

1. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Ilmu Sosial, UIR Press 2017. HAKI No. 000139076
2. Administrasi dan Manajemen Pembangunan, UIR Press 2017. HAKI No. 000139077
3. Manajemen Strategis Pemerintahan, UIR Press 2018, HAKI No. 000139078
4. Organisasi Birokrasi dan Manajemen Pemerintahan, UIR Press 2019, HAKI No. 000139079

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan saya bersedia menerima sangsi.

Pekanbaru, November 2019



(Prof. Dr. H. Sufian Hamim, M.Si)

II. Anggota Peneliti :

1. Nama : LOLITA VIANDA . S.Sos. M.Pd
2. Tempat/Tgl. Lahir : Koto Tinggi , 24 Juli 1976
3. Alamat Jl. Pendidikan, Komp. Perumahan Damai Asri Regency Blok C. No.7 Purwodadi – Pekanbaru, email lolita.vianda@gmail.com, (+6285267380390) Pekanbaru-Indonesia.

TUJUAN

Untuk mengembangkan keahlian saya di bidang Pendidikan khususnya dalam topik yang berkaitan dengan Sosiologi Pendidikan untuk lebih meningkatkan kemampuan mata pelajaran khusus ini di institusi tempat saya bekerja.

PROFIL PRIBADI PROFIL

PRIBADI
Pekerjaan dan Organisasi Saat Ini: * Dosen di Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Islam Riau * Dosen di Fakultas Pendidikan Universitas Terbuka Riau * Guru mata pelajaran Ilmu Sosial di SMA ke-9 di Pekanbaru
Latar Belakang Pendidikan Latar Belakang: Magister Pendidikan
Profesional Latar Belakang: * Penelitian Kompetensi Pedagogis Guru * Ketua Pengabdian Masyarakat untuk kelompok etnis di desa Buluh Cina * Ketua Pengabdian Masyarakat untuk penduduk lokal Kampar di provinsi Riau * Penyelenggara kegiatan sosial untuk narapidana perempuan Korektif Pekanbaru Fasilitas * Ketua Pengabdian Masyarakat untuk mengembangkan Budaya Melayu Di Kab. Siak Dan sungai Apit * Ketua Pengabdian Masyarakat untuk mensosialisasikan Budaya Di Istana Sayap Pelalawan

❖ **Ambisi Masa Depan:**

Saya ingin memiliki pekerjaan yang sesuai dengan panggilan saya yang sebenarnya sebagai seorang pendidik dan sosiolog yang tidak hanya berusaha untuk meningkatkan kompetensinya tetapi juga terus berkontribusi pada masyarakat secara umum dan pendidikan pada khususnya. Sejalan dengan tujuan saya ini, saya ingin menyelesaikan program gelar doktoral saya di Sekolah Tinggi Pendidikan terutama dalam topik yang berkaitan dengan Sosiologi Pendidikan di Universitas Otago di Selandia Baru.

❖ **Komitmen terhadap negara asal**

Sebagai warga negara Indonesia, adalah tanggung jawab saya untuk menjunjung tinggi martabat dan kebanggaan bangsa saya melalui pendidikan. Melalui penelitian berkelanjutan yang bertujuan menemukan solusi untuk negara saya, hasil penelitian diwujudkan dalam bentuk langkah nyata, yaitu memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk menghasilkan peraturan bagi kemajuan negara. Masalah penting lain yang saya yakin Indonesia dapat memanfaatkan adalah bagaimana siswa pada umumnya dan siswa sekolah menengah pada khususnya dapat didorong untuk meningkatkan kedudukan akademis mereka menggunakan langkah-langkah yang dipikirkan dengan cermat dan diteliti.



PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- 1983-1989 Sekolah Dasar 1, Kabupaten Limbanang, Provinsi Sumatera Barat
- 1989-1992 Sekolah Menengah Taram di Kabupaten Lima Puluh Kota
- 1992-1995 Sekolah Menengah Atas 2, Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
- 1996-2002 Gelar Sarjana Departemen Ilmu Politik dan Sosial dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Provinsi Riau
- 2004-2005 Sertifikasi Lisensi Pengajaran, Universitas Riau, Pekanbaru
- 2007-2012 Program Pascasarjana di Fakultas Sosiologi Departemen Pendidikan, Magister Pendidikan, Universitas Nasional Padang

Pendidikan Non Formal

- 1995-1996 Pendidikan Akuntansi 1 dan 2

Prestasi Akademik

- 2012 Desain dan Perencanaan Penilaian Siswa

Pengalaman Lain

Tulis dalam urutan kronologis terbalik, lembaga tempat Anda belajar, ketika Anda belajar dan hasil. Jika Anda melamar posting pertama Anda setelah lulus, maka bagian ini dapat menyoroti aspek PhD Anda yang relevan dengan posting yang Anda lamar. Sertakan abstrak PhD Anda. Anda dapat memilih untuk menulis sinopsis yang lebih rinci di sini atau Anda dapat menjadikan ini sebagai Adendum (jika relevan dengan aplikasi Anda). Lihat Pedoman untuk informasi lebih lanjut.

KETENAGAKERJAAN

7. RINCIAN KETENAGAKERJAAN				
Pekerjaan Saat Ini				
Posisi/Judul	Dosen			
Institusi	Universitas Islam Riau			
Mata Kuliah Yg diampu	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah			
Pangkat/Gol	-			
Ketenagakerjaan Alamat	Jalan: Jl.Kaharuddin Nasution No.113			
	Kota: Pekanbaru			
	Negara / Propinsi: Riau		Kode Pos: 28284	
Deskripsi Tugas: * Melakukan penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat * Desain silabus untuk mata pelajaran yang ditugaskan * Rencanakan kegiatan pendukung pembelajaran untuk seluruh semester * Ciptakan media untuk pembelajaran di kelas * membantu mahasiswa melakukan penelitian				
Sejarah Pekerjaan				
Organisasi/Departemen	Penunjukan	Sifat Pekerjaan	Periode (dd / mm / yy)	
			Dari	Ke
SMA 9 Pekanbaru	Guru	Menyediakan instruksi kelas	2012	Sampai sekarang
Universitas Terbuka	Dosen	menyediakan instruksi kelas	2012	Sampai sekarang
Universitas Islam Riau	Dosen	Menyediakan instruksi kelas	2015	Sampai sekarang

KEANGGOTAAN PROFESIONAL

- Anggota Dosen Nasional

KETERAMPILAN

- *Instruktur*

2008 Instruktur di Bina Profesi, sebuah lembaga pendidikan non formal yang memberikan keterampilan praktis di sejumlah mata pelajaran terkait perbankan dan keuangan.

PENELITIAN

- Sistem Inventarisasi Pasokan Bahan Baku di Rickri Co. di Pekanbaru.
- Penilaian Kompetensi Pedagogik Guru Ilmu Sosial dalam Perencanaan dan Pelaksana Silabus.
- Islam di Indonesia: Perkembangan Islam di Tanah Layar Kuning dilihat dari Perspektif Budaya Melayu.
- Pendidikan Anti korupsi
- Pengembangan dan sosialisasi situs sejarah Candi Muara Takus
- Mengali Budaya Melayu Di Kabupaten Siak
- **Menggali Budaya Melayu Riau tentang Nilai-nilai leluhur yang menjadi pengangan bagi masyarakat, Tahun 2018 di Istana Sayap Kabupaten Pelalawan**

MENGAJAR

- 2005-2012 Guru mata pelajaran Ilmu Sosial di SMP Negeri 12 di Pekanbaru, Riau.
 - Memberikan instruksi materi kelas untuk tujuan meningkatkan keberhasilan mereka di bidang akademik melalui kursus materi studi yang ditentukan.
 - Membimbing siswa untuk tujuan menyediakan lingkungan belajar yang aman dan optimal.
 - Memperagakan dan melakukan berbagai metode pengajaran yang diperlukan untuk menyelesaikan materi silabus dan tugas mata pelajaran khusus untuk tujuan menyediakan program yang efektif yang akan memenuhi kebutuhan siswa secara individu.
- 2012-sekarang Guru Ilmu Sosial di Sekolah Menengah Atas No. 9 di Pekanbaru, Riau
 - Merencanakan dan menyelenggarakan materi kelas di lingkungan belajar yang kondusif dan memastikan kesejahteraan dan keselamatan siswa.

- Merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan sehari-hari yang melibatkan siswa dalam sejumlah kegiatan menggunakan berbagai bahan dan tindakan termasuk kunjungan lapangan dan program keluar.
- Mengawasi dan membimbing dan menampilkan perilaku yang sesuai dan teknik pengajaran untuk asisten pengajar dan sukarelawan di bawah pengawasan.

PUBLIKASI dan PRESENTASI

- 2007 Mempersiapkan dan Menyusun Bahan Modular Ekstra Siswa untuk mata pelajaran Sosiologi di SMP Cendana Putih Co. in Pekanbaru.
- 2015 Mempersiapkan dan Menyusun Bahan Ekstra Modular Siswa untuk mata pelajaran Sosiologi di Sekolah Menengah Umum ke-9.

PENDANAAN DAN PENGHARGAAN AKADEMIK

- **2017 Penghargaan dan Pengakuan**
 - ✓ Sertifikat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Untuk Sosialisasi Budaya Melayu
- **2016 Penghargaan dan Pengakuan**
 - ✓ Sertifikat Pengakuan dari Televisi Riau untuk pencapaian luar biasa dalam Pengabdian dalam Prakarsa Pendidikan
 - ✓ Sertifikat Pengakuan dari Otoritas Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan Penelitian Sosial menilai kontribusi kelompok etnis lokal dalam melestarikan situs bersejarah di daerah.
 - ✓ Sertifikat Pengakuan dari Dinas Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir untuk Penelitian Sosial tentang Dampak Kegiatan Peternakan pada Masyarakat Lokal.
- **Sertifikat Akademik 2016 Sertifikat**
 - ✓ Pengakuan dari Sekolah Menengah No. 9 Pekanbaru atas pencapaian Prakarsa Penelitian Sosiologi sebagai Ketua.
- **Sertifikat Akademik 2015**
 - ✓ Program Akreditasi untuk Tutor Universitas Terbuka.
 - ✓ Sertifikat dari Kantor Menteri Riset dan Teknologi, Program Sertifikasi Guru Profesional untuk Pendidik
 - ✓ Sertifikat dari Sekolah Menengah Atas No. 9 Pekanbaru sebagai pengakuan atas pencapaian Penelitian Sosiologi sebagai Ketua.

- **Sertifikat Akademik 2014**
 - ✓ Sertifikat dari Sekolah Menengah Atas No. 9 Pekanbaru sebagai pengakuan atas pencapaian Penelitian Sosiologi sebagai Ketua.
 - ✓ Sertifikat dari Badan Nasional Jaminan Kualitas Pendidikan Provinsi Riau tentang penyelesaian Pelatihan Kurikulum 2013
 - ✓ SMANo. 9 Pekanbaru tentang penyelesaian Pelatihan In-House tentang Kurikulum 2013
- **2013 Sertifikat Akademik**
 - ✓ Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau pada selesainya Pembuatan Berbagai Media untuk Tujuan yang Terkait dengan Pembelajaran.
- **2012 Sertifikat Akademik**
 - ✓ Kantor Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau pada penyelesaian Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - ✓ SMU No 9 Pekanbaru tentang penyelesaian Peningkatan Kualitas Pendidikan Workshop
- **2008 Sertifikat Akademik**
 - ✓ Muslem Women Development Foundation's Seminar yang disponsori Seminar tentang Pendidikan
 - ✓ Muslim Seminar yang disponsori Yayasan Pengembangan Perempuan pada Hari Ibu
 - ✓ Kantor Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Pekanbaru pada selesainya seminar tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan
- **2008**
 - ✓ Mengamankan pemerintah kota Provinsi Riau untuk biaya kuliah Program Pascasarjana
- **2006 Sertifikat dari**
 - ✓ Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Pekanbaru pada selesainya Program Pelatihan Kurikulum
 - ✓ Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekanbaru pada selesainya Peningkatan Kualitas Program Pelatihan Pendidikan

